

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI UNTUK
MASYARAKAT MISKIN DI DESA SIARANG-ARANG KECAMATAN
PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKIRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Strata Satu
Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru



SASMIANI

NPM: 177110104

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : SASMIANI
Npm : 177110104
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan hilir.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan di nilai relatif telah memenuhi ketentuan-tentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat disetujui untuk di uji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 2 Agustus 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi publik

Pembimbing,


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si


Kartius, S.Sos., M.Ap

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Sasmiani
Npm : 177110104
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Naskah skripsi ini secara keseluruhan telah di nilai telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Serjana Starata Satu Bidang Ilmu Sosial.

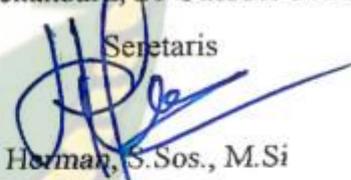
Ketua



Kartius, S.Sos., M.AP

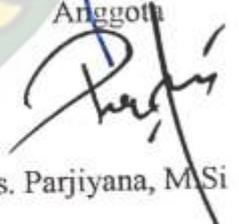
Pekanbaru, 26 Oktober 2021

Secretaris



Hormah, S.Sos., M.Si

Anggota



Drs. Parjiyana, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan 1



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

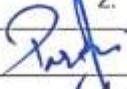
=====

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

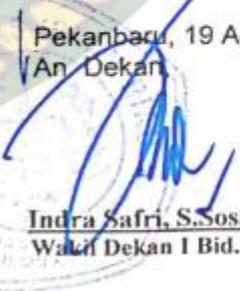
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1218/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 18 Agustus 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 19 Agustus 2021 jam 13.30 – 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Sasmiani
NPM : 177110104
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Nilai Ujian : Angka : "80.66" ; Huruf : "A"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Kartius, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Herman, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Parjiyana, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Andri Kumiawan, B.PM., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 19 Agustus 2021
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1218/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sasmiani
N P M : 177110104
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Struktur Tim :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Kartius, S.Sos., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Herman, S.Sos., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Drs. Parjiyana, M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Agustus 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

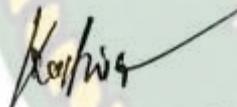
PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sasmiani
Npm : 177110104
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Naskah skripsi ini telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai dan telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 26 Oktober 2021

Ketua



Kartius, S.Sos., M.AP

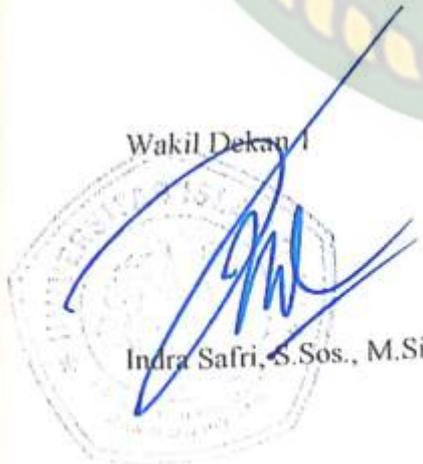
Sekretaris



Herman, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

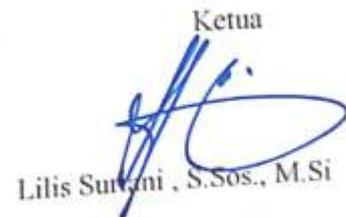
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik

Ketua



Lilis Surtani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk usulan penelitian dapat penulis selesaikan. Proposal yang berjudul “Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.” Ini penulis menulis dan di ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar serjana strata satu pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang di tetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin di temukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari pada pembaca

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalama proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada

- penulis dalam menimba ilmu pada Lembaga Pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan FISIPOL Unuversitas Isalam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam membina ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
 3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku ketua program studi Administrasi Publik dan memberi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi.
 4. Bapak Eko Handrian, S.Sos., M.Si selaku Seketaris Program Ilmu Administrasi Publik yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam membina ilmu dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
 5. Bapak Kartius, S.Sos., M.AP sebagai pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membagi pengetahuan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini terhadap apa yang telah diarahkan.
 6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
 7. Terkhusus dan teristimewa ucapan penulis yang tiada sembahkan kepada ayahanda Jasrijal, ibunda Ariana dan adinda Sumini selalu memberi semangat dan motivasi.

8. Terimakasih kepada tunangan saya BRIPTU Muhammad Saleh Afiz yang telah memberi saya support, dan saya ucapkan terimakasih kepada sahabat saya Dewi Melinda Sari S.Pd, Nicka Abrilla S.Pd, Sugiarti S.Pd dan Sheila Fazira telah memberi saya support.
9. Pegawai, dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dan melengkapi kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
10. Teruntuk teman-temanku yang berada di grup Administrasi Publik, Wisuda 2021, SNSD dan teman-teman seperjuangan semua mahasiswa Administrasi Publik angkatan 2017 dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu terimakasih telah memberi saya motivasi dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis memohon kepada yang maha kuasa semoga jasa baik beliau dibalas dengan rahmat dan karunia yang melimpah. Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap kepada pembaca.

Pekanbaru, 2 Agustus 2021

Penulis,

Sasmiani

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA	iv
SURAT KEPUTUSAN PENGUJI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	22
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	24
A. Studi Kepustakaan.....	24
1. Konsep Administrasi	24
2. Konsep Organisasi	27
3. Konsep Manajemen	28

4. Konsep Kebijakan Publik.....	31
5. Konsep Implementasi Kebijakan	36
6. Konsep Pemberdayaan	48
B. Kerangka Pikir	51
C. Konsep Operasional	53
D. Operasional Variabel.....	55
E. Teknik Pengukuran	56
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Tipe Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Populasi dan Sampel	60
D. Teknik Penarikan Sampel	62
E. Jenis dan Sumber Data	62
F. Teknik Pengumpulan Data	63
G. Teknik Analisis Data.....	64
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	65
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	66
A. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir	66
B. Sejarah Singkat Kecamatan Pujud	67
C. Sejarah Singkat Desa Siarang-Arang	68
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Identitas Responden	75
B. Gambaran Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni	78
1. Pelaksanaan Tingkat Pusat	78
2. Pelaksanaan Tingkat Provinsi	79
3. Pelaksanaan Tingkat Kabupaten	80
4. Pelaksanaan Tingkat Kecamatan.....	84
5. Pelaksanaan Tingkat Desa.....	85
C. Struktur Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni Dari Tingkat Pusat ,Provinsi,Kabupaten,Kecamatan dan Desa	89

D. Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	90
1. Tujuan Kebijakan	90
2. Sumber Daya	94
3. Sikap atau Kecendrungan (Disposisi) Para Pelaksana	99
4. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksanaan	102
5. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik.....	106
E. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Rimah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	109
BAB VI PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR KEPUSTAKAAN	116

DAFTAR TABEL

	Halaman
I.1. Jumlah Kuota Bantuan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Pujud Tahun 2010-2020	8
I.2. Jumlah Masyarakat Per/KK Setiap Kepenghuluan Dan Jumlah Masyarakat Miskin Per/KK Setiap Kepenghuluan Di Kecamatan Pujud	10
I.3. Jumlah Penduduk Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir 2019	12
I.4. Jumlah Masyarakat Miskin Per/KK Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud 2019	13
I.5. Jumlah Penerima Program Bantuan Rumah Layak Huni Di Desa Siarang-Arang Berdasarkan Tahun 2010-2020.....	13
II.1. Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	55
III.1. Populasi dan Sampel Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Kayak Huni Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud	61
III.2. Populasi dan Sampel Rumah Tangga Miskin Sebagai Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Di Desa Siarang-Arang	61
III.3. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	65
IV.1. Jumlah Penduduk	70
IV.2. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Agama	70
IV.3. Tingkat Pendidikan	71
IV.4. Mata Pencarian Pokok	71

IV.5. Jumlah Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang	73
V.1. Klarifikasi Responden Sebagai Penerima Bantuan Berdasarkan Umur	76
V.2. Klarifikasi Responden Sebagai Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	77
V.3. Klarifikasi Responden Sebagai Penerima Bantuan Berdasarkan Pendidikan.....	78
V.4. Jawaban Responden Mengenai Indikator Tujuan Kebijakan dalam Bantuan Rumah Layak Huni Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	91
V.5. Jawaban Responden Mengenai Indikator Sumber Daya dalam Bantuan Rumah Layak Huni Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	95
V.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator Sikap Atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana dalam Bantuan Rumah Layak Huni Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.....	100
V.7. Jawaban Responden Mengenai Indikator Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksanaan dalam Bantuan Rumah Layak Huni Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.....	103
V.8. Jawaban Responden Mengenai Indikator Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik dalam Bantuan Rumah Layak Huni Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	107

DAFTAR GAMBAR

Halaman

II.I. Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.....	52
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kuisisioner Penelitian Tentang Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Yang Telah Menerima Di Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir 120
2. Daftar Wawancara Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Ketua POKMAS Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir 128
3. Tanggapan Responden Masyarakat Desa Siarang-Arang dalam Bantuan Rumah Layak Huni Di Desa Siarang-Arang Mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Didesa Siarang-Arang..... 133
4. Dokumentasi Foto Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir 135
5. Surat Rekomendasi Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik..... 139
6. Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... 140
7. Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Bagan Siapi Api 141
8. Surat Keterangan Penelitian Dari Kantor Desa Siarag-Arang 142

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sasmiani
Npm : 177110104
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila ia kemudian hari ditemukan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir satu dan dua tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Agustus 2021

Penulis



10000
METERAI
TEMPER
626C4AJX368836338
Sasmiani

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI UNTUK
MASYARAKAT MISKIN DI DESA SIARANG-ARANG KECAMATAN
PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR

Abstrak
Oleh
Sasmiani

Penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, indikator penilaian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Sikap dan Kecendrungan (Disposisi) Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksanaan, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Tipe penelitian survey deskriptif kuantitatif yaitu menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data, dan data kuisioner ini dijadikan alat untuk menganalisis, dan untuk populasi sampel berjumlah 59 orang, teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini teknik purposive sampling, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, ditemukan dalam pelaksanaan masih ada terdapat kurangnya sosialisasi antar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan pihak Desa dan masyarakat, sehingga menimbulkan kurang pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan program. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Dapat di kategorikan Cukup Efektif. Demi terlaksananya program ini dengan baik, disarankan kepada pelaksana program lebih teliti dalam pendataan agar program sampai kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan, dan menambah kuota bantuan rumah layak huni.

Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan, Bantuan Sosial.

IMPLEMENTATION OF LIABILABLE HOUSING ASSISTANCE PROGRAM
FOR THE POOR IN SIARANG-ARANG VILLAGE, PUJUD DISTRICT,
ROKAN HILIR REGENCY

Abstract

By
Sasmiani

This study was to determine the implementation of the housing assistance program for the poor in Siarang-arang village, Pujud district, Rokan Hilir regency, the assessment indicators used in this study are the size and objectives of the policy, resources, attitudes and tendencies (disposition) of the implementers, communication between organizations and implementation activities, and the economic, social, and political environment. The type of quantitative descriptive survey research is using questionnaires as a data collection tool, and this questionnaire data is used as a tool to analyze, and for a sample population of 59 people, the sampling technique used in this study is purposive sampling technique, the types and sources of data used are data primary and secondary data, data collection techniques used interviews, observation and documentation. In this study, it was found that in the implementation there was still a lack of socialization between the public housing and settlement areas office with the village and the community, thus causing a lack of public understanding about program implementation. So the researcher concludes that the implementation of the housing assistance program for the poor in Siarang-arang village, Pujud district, Rokan Hilir regency can be categorized as quite effective. For the sake of implementing this program properly, it is recommended that program implementers be more careful in data collection so that the program reaches people who are entitled to receive, and increase the quota for housing assistance.

Keywords: Implementation, Empowerment, Social Assistance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi merupakan proses kegiatan dengan bantuan berbagai sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sering didefinisikan administrasi dalam arti sempit adalah sering dimaknai sebagai kegiatan tulis-menulis, catat-mencatat, mengetik, surat-menyurat, dan administrasi dalam arti luas yaitu sebagai proses kerja sama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Administrasi disini dikaitkan sebagai proses yang dijalankan oleh lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan negara, dengan melibatkan kerjasama antara lembaga organisasi dan kelompok organisasi. Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan salah satu dari tujuan Bangsa Indonesia sebagaimana telah termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan negara sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah terbaharui dengan pasal 12 Undang-

Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa salah satu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai mana dimaksud meliputi sosial. Penanggulangan masalah sosial, yaitu salah satunya masalah kemiskinan. Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak luput dari masalah kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi perbincangan di Indonesia, kemiskinan adalah suatu ketidak berdayaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti, sandang, pangan, papan, serta pendidikan dan kesehatan. Hal ini di sebabkan sempitnya lapangan pekerjaan, penghasilan yang tidak menetap, terbatasnya keterampilan yang di miliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah.

Miskin adalah kondisi yang secara umum menggambarkan seseorang atau suatu rumah tangga atau komunitas yang berada dalam serba kekurangan, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan yang paling dasar. Akibat dari itu, yang bersangkutan mengalami berbagai keterbatasan baik terhadap peran-peran yang secara sosial, ekonomi, politik, maupun budaya yang harus di lakukan. Keterbatasan seperti itu, bias karena akibat dari internal individu atau rumah tangga yang gagal beradaptasi terhadap lingkungan atau didalam merespon perubahan (thohir 2008).

Dimana masalah kemiskinan hingga kini selalu menjadi hambatan dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin Indonesia berjumlah 25,95 juta orang dari 267,7 juta penduduk di Indonesia. Melihat jumlah

penduduk Indonesia yang cukup besar, perlu adanya penanganan serius. Penanganan tersebut diharapkan ada keterlibatan dari semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Kriteria kemiskinan menurut kementerian Sosial Republik Indonesia, meliputi:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 M2 perorang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah bambu kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/sungai/ air hujan
7. Bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu
9. Membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan,

dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000 per bulan.

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat sd/tamat sd
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000, seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya

Menurut pasal 1 ayat (7) No 1 Tahun 2011 tentang perumahan, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencangkup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah tangga sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksana bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan dapat tercapai ketahanan keluarga. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a UU PKP).

Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sangat kaya sumber daya alam (SDA) terutama minyak dan sumber daya alam lainnya, namun demikian sampai dengan september 2013 menurut data Badan Statistik, di Kabupaten Rokan Hilir masih

terdapat penduduk miskin sekitar 9,30% dari seluruh jumlah penduduk. Tingkat kemiskinan disebabkan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat desa. Kebutuhan akan rumah bagi masyarakat belum memenuhi standar layak untuk dihuni, hal tersebut yang menjadi latar belakang Kabupaten Rokan Hilir untuk mengangandakan kebijakan penanganan masalah tersebut.

Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu yang melaksanakan Program Rumah Layak Huni. Di Rokan Hilir program rumah layak huni mulai pada tahun 2001. Program ini merupakan program pemerintah kabupaten Rokan Hilir guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat miskin di daerahnya. Dalam tingkat Kabupaten Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor 57 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hilir, Bupati Rokan Hilir menyediakan bantuan berupa rumah layak huni untuk masyarakat miskin.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai Dinas yang melaksanakan kegiatan ini dan dibantu oleh pihak Kecamatan, Desa/kelurahan dan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada peraturan Bupati Rokan Hilir, oleh karena itu pihak-pihak yang bersangkutan harus bertanggung jawab terhadap lancarnya tugas ini dalam mencapai tujuan yang telah disepakati atau di tetapkan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berdasarkan Peraturan Bupati Kab. Rokan Hilir No.57

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan penjelasan diatas dimana struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
2. Sekretariat
 - a. Subbagian ketatausahaan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Program
3. Bidang Perumahan Rakyat
 - a. Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi dan Registrasi
 - b. Seksi Penyediaan Perumahan Rakyat, dan
 - c. Seksi Pemeliharaan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
4. Bidang Kawasan Pemukiman
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Pemukiman.
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman, dan
 - c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pelaksanaan Rumah Layak Huni yang bertanggung jawab di lapangan adalah Kepala Bidang Pemukiman dan prasarana desa dengan dibantu oleh Kepala Sub Bidang pengembangan kawasan terpadu tata pemukiman sumber daya dan lingkungan pada bidang pemukiman untuk melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi pelaksanaan program, dan

penanggung jawab kepada pengguna anggaran. Sumber dana untuk program ini berasal dari APBD Kabupaten Rokan Hilir.

Pemerintah Rokan Hilir membuat program ini bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat dengan cara:

1. memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat di Kepenghuluan / kelurahan.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pemeliharaan.
3. Memberikan peluang kerja kepada warga/masyarakat kepenghuluan/ kelurahan dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.
4. Mendorong masyarakat dan penyelenggara pemerintah yang lebih cerdas, jujur, bertanggung jawab, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan tujuan program Pemerintah Rokan Hilir meningkatkan produktivitas masyarakat terdiri dari beberapa cara di atas, dan penulis telah menemukan dan prasure sementara yang dilakukan penulis langsung kelapangan, maka penulis menemukan masih ada beberapa aksesibilitas yang berupa bantuan rumah layak huni yang belum terlaksana dengan baik, masih ada beberapa masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan bantuan rumah layak huni khususnya didesa Siarang-arang.

Dapat kita lihat pada umumnya di Kabupaten Rokan Hilir disetiap kecamatannya masih ada masyarakat miskin yang memerlukan bantuan rumah layak huni dari pemerintah yaitu salah satu Kecamatan Pujud yang melaksanakan program bantuan rumah layak huni di kabupaten Rokan Hilir adalah kecamatan Pujud, setiap tahunnya 15 Kepenghuluan dan 1 Kelurahan di kecamatan Pujud mendapatkan bantuan rumah layak huni. Bantuan ini di bagikan ke Desa/kelurahan dan setiap Desa/Kelurahan mendapatkan rumah layak huni untuk masyarakat tergolong miskin. Adapun data bantuan dari Kabupaten untuk Kecamatan Pujud yaitu:

Table I.1. Jumlah Kuota Bantuan Rumah Layak Huni Di Kecamtan Pujud Tahun 2010-2020.

No	Kepenghuluan /Kelurahan	Tahun										Juml ah
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Air Hitam	5		3	2		4				2	16
2	Babusalam Rokan					5	3		3	8		66
3	Kasang Bangsawan		2					4		3		9
4	Kasang Bangsawan Muda						3					3
5	Pematang Genting						1		1	1		3
6	Perkebunan Siarang-arang							2	4	1		7
7	Pujud					2	1	2			1	15

						0					
8	Pujud Selatan	2	1		2		4			5	14
9	Pujud Utara						3	4			7
10	Siarang-arang	5		5			3		1	1	15
11	Siarang-arang Rokan			1	1	1			1		18
12	Suka Jadi	2			2					8	12
13	Suka Mulya								1	1	2
14	Sungai pinang									1	1
15	Teluk Nayang	5		4					6		15
16	Ulak kemahang						2			4	6
	Jumlah	1	3	1	7	6	2	1	1	1	2
		9	3	3	9	9	6	7	4	2	

Sumber: kantor camat pujud 2020

Dapat kita lihat pada table diatas jumlah kuota penerima bantuan rumah layak huni dari Kabupaten untuk Kecamatan Pujud, yang paling banyak menerima bantuan rumah layak huni tahun 2010 sampai 2020 yaitu kepenghuluan Babusalam Rokan 66 unit dan yang paling sedikit kepenghuluan Sungai Pinang 1 unit. Dari data diatas masih banyak penduduk miskin di setiap kepenghuluan/kelurahan yang belum menerima bantuan rumah layak huni tersebut.

Table I.2. Jumlah Masyarakat Per/KK Setiap Kepenghuluan dan Jumlah Masyarakat Miskin Per/KK Setiap Kepenghuluan di Kecamatan Pujud.

NO	Kepenghuluan/ Kelurahan	Masyarakat Per/KK	Masyarakat Miskin Per/KK
1	Air Hitam	225/KK	71/KK

2	Babusalam Rokan	508/KK	91/KK
3	Kasang Bangsawan	871/KK	98/KK
4	Kasang Bangsawan Muda	720/KK	32/KK
5	Pematang Genting	617/KK	60/KK
6	Perkebunan Siarang-Arang	497/KK	24/KK
7	Pujud	781/KK	95/KK
8	Pujud Selatan	701/KK	90/KK
9	Pujud Utara	212/KK	52/KK
10	Siarang-Arang	783/KK	101/KK
11	Siarang-Arang Rokan	276/KK	45/KK
12	Suka Jadi	916/KK	74/KK
13	Suka Mulya	299/KK	17/KK
14	Sungai Pinang	506/KK	98/KK
15	Teluk Nayang	525/KK	90/KK
16	Ulak Kemahang	486/KK	32/KK
	Jumlah	8.924/KK	1.070/KK

Sumber: Kantor Camat Pujud 2020

Dari survei sementara yang saya lihat di kecamatan Pujud masih banyaknya masyarakat miskin di kepenghuluan/kelurahan seperti data keluarga miskin di atas. Maka penulis memilih desa Siarang-arang untuk menjadi lokasi penelitian karena dari survei sementara penulis melihat setiap tahun desa siarang-arang menerima bantuan sedikit, sedangkan kondisi kemiskinan di desa siarang-arang sangat tinggi dari desa yang lainnya.

Dapat kita lihat pada data-data di atas masih banyaknya kepenghuluan/kelurahan yang masyarakatnya tergolong miskin belum menerima bantuan rumah layak huni seperti kita lihat pada kepenghuluan/kelurahan Kasang Bangsawan,

Kasang Bangsawan Muda, Pematang Genting, Perkebunan Siarang-arang, Pujud Utara, Suka Mulia, Sungai Pinang, Ulak Kemahang. Dari Survei sementara yang saya lakukan kenapa Kepenghuluan/kelurahan menerima bantuan sedikit dikarenakan masyarakat kita bisa memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan rumah ini. Maka saya mengangkat Kepenghuluan Siarang-arang untuk menjadi lokasi penelitian saya karena, jumlah masyarakat miskin di Siarang-arang tinggi dari Kepenghuluan/kelurahan yang lain dan banyak masyarakat yang persyaratannya lengkap belum menerima.

Kriteria calon Penerima Program bantuan Rumah Sederhana Layak Huni dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa Kabupaten Rokan Hilir Riau adalah yaitu:

1. Tidak memiliki rumah/memiliki rumah tidak layak huni.
2. Memiliki tanah sendiri atau tanah hibah (di buktikan dengan surat kepemilikan).
3. Tanah siap bangun.
4. Diutamakan berusia lanjut.
5. Status perkawinan (janda, duda, dan utuh).
6. Tidak memiliki penghasilan tetap (masyarakat berpenghasilan rendah).
7. Berdomisili minimal 5 tahun di desa setempat.

Desa Siarang-arang merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, memiliki lima Dusun. Di desa Siarang-arang mayoritas pekerjaan masyarakatnya yaitu nelayan dan petani. Dapat

dilihat masih adanya masyarakat miskin yang tidak memenuhi kebutuhan sosial seperti rumah yang layak untuk di huni, hal ini di sebabkan karena hasil pendapatan yang tidak memuaskan dan keterbatasan kemampuan bekerja yang dimiliki. Bagi masyarakat miskin rumahnya adalah tempat tinggal tanpa memperhitungkan kelayakan yang di lihat dari segi mental, sosial, dan fisik. Adapun berikut jumlah penduduk Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada table berikut:

Tabel I.3: Jumlah penduduk Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir 2019.

No	Dusun	Masyarakat per/KK	Miskin per/KK	Penduduk (Jiwa)
1	Dusun 1	232	31	951
2	Dusun 2	193	25	752
3	Dusun 3	107	15	440
4	Dusun 4	116	10	431
5	Dusun 5	135	20	565
	Jumlah	783/KK	101/KK	3.139

Sumber: Kantor Desa Siarang-Arang 2020.

Pada tabel diatas jumlah penduduk Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019 yang terdiri dari 5 Dusun, dapat di lihat pada Desa Siarang-Arang jumlah penduduk jiwa paling sedikit dimana jumlah penduduk di Dusun 4 yaitu 431 jiwa. Adapun jumlah masyarakat misikin di Desa Siarang-Arang yaitu pada tabel berikut:

Tabel I.4: Jumlah Masyarakat Miskin per KK di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud 2019.

No	Jumlah Kepala Keluarga Miskin/ KK	Janda / KK	Miskin sekali / KK

1	101 / KK	30 / KK	71/ KK
---	----------	---------	--------

Sumber: Kantor Desa Siarang-Arang 2020.

Dalam tabel di atas dapat kita lihat jumlah masyarakat miskin per KK di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud tahun 2019, hal ini diketahui jumlah KK keseluruhan sebanyak 101 KK, jumlah kepala keluarga janda 30 KK dan dapat kita lihat jumlah masyarakat miskin sekali 71 KK.

Dari jumlah 101 KK miskin di Desa Siarang-Arang yang menerima bantuan rumah layak huni dari tahun 2010-2020 hanya 15 KK, karena terbatasnya kuota bantuan rumah layak huni, sehingga 86 KK yang belum dapat menerima bantuan.

Tabel I.5: Jumlah Penerima Program Bantuan Rumah Layak Huni Di Desa Siarang-Arang Berdasarkan Tahun 2010-2020.

No	Dusun	Tahun per unit					Jumlah
		2010-2011	2012-2013	2015-2016	2017-2018	2019-2020	
1	Dusun 1	4				1	5
2	Dusun 2	1		1			2
3	Dusun 3		1	1	1		3
4	Dusun 4		1				1
5	Dusun 5		3	1			4
	Jumlah	5	5	3	1	1	15

Sumber: Kantor Desa Siarang-Arang 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerima program bantuan rumah layak huni hanya 15 unit selama 10 tahun, karena penerimaan bantuan pertahun hanya 5 atau 2 unit perdusunnya. Dari tabel diatas juga dapat dilihat masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan rumah layak huni ini, bapak

Yunihardi selaku Kepala Bidang Perumahan menegaskan bahwa masyarakat yang belum mendapatkan jatah pembangunan rumah layak huni ini semua sudah terdata, namun untuk pihaknya lebih mendahulukan skala prioritas. “masyarakat yang belum mendapatkan jatah rumah layak huni ini bersabar, semua sudah terdata oleh kita, namun kami dahulukan prioritas dulu yang benar-benar berhak menerimanya sesuai kriteria misalnya mereka sudah tua, janda dan tidak mempunyai pekerjaan setara, rumah mereka banjir, kita masyarakat dapat memeklumi hal ini.”

Dapat kita lihat dari tabel diatas tidak setiap tahun semua masyarakat dapat menerima bantuan rumah layak huni karena terbatasnya kuota, penerima bantuan tidak hanya masyarakat Siarang-Arang atau masyarakat Kecamatan Pujud saja, karena masih adanya desa-desa lain yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi rumah setiap tahunnya pasti terjadi perubahan antara rumah yang sudah lama dapat dengan yang baru menerima bantuan ini. Perbedaannya hanya sebatas cet yang pudar dan sedikit berlumut. Untuk bangunan tidak ada yang berbeda dari tahun 2010-2020 semua fasilitas yang masyarakat terima sama semua, perbedan hanya terdapat pada harga bahan bangunan, untuk ukuran sama.

Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Rokan Hilir dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyediakan dana untuk Desa Siarang-Arang sebesar 84 juta untuk 1 unit rumah, rumah dengan tipe 36 dengan bangunan secara permanen dengan batu. Rumah dengan tipe 36 adalah rumah yang memiliki luas bangunan $6m \times 6m = 36 m^2$. Desain rumah tipe 36 yaitu terdapat dua kamar, satu kamar mandi, ruang tamu dan keluarga, dapur sekaligus ruang makan.

Tahap pembangunan rumah layak huni jenis kondisi tanah keras (darat) yaitu:

1. Pekerjaan pondasi

Pemilihan pondasi ini sesuai dengan kondisi lokasi kegiatan sebagai berikut:

a. Pondasi roolag bata pas 1 batu

Struktur terbuat dari beton campuran 1:2:3 tulangan U24 dan pasangan bata roolag 1 batu dengan campuran adukan 1 PC:2 PSR dan bagian bawah pondasi di dukung oleh pasir urug dan lantai kerja dengan camp 1:3:5 dengan ketebalan 5cm serta tinggi struktur pondasi disesuaikan dengan kondisi lokasi bangunan dari muka tanah atau batas tinggi air.

b. Beton cor

c. Pondasi batu bata (menerus) pas 1 batu campur 1:4

2. Pekerjaan rangka struktur

Rangka/struktur dari rumah dibuat dari beton bertulang camp 1:2:3 berkualitas baik dengan ukuran:

a. Sloof beton 15/25

b. Kolom praktis 13/13

c. Ring balok 13/15

d. Balok latci 13/13

e. Plat lantai 5cm

3. Dinding

Pekerjaan dinding yang digunakan untuk bangunan ini menggunakan material batu bata dengan mempertimbangkan aspek teknis dan kualitas bahan. Pemasangan batu bata adalah pasang $\frac{1}{2}$ bata dengan dilapisi plasteran campuran 1 banding 4 dan diaci dengan memperhatikan keserasian dengan kepantasan estetika bangunan.

4. Lantai

Lantai dapat dipilih dengan mempertimbangkan bahan lokal berupa keramik dan tegel. Pekerjaan lantai ini harus memperhatikan aspek-aspek teknis misalnya, untuk keramik dan tegel harus standar SNI dan dipasang dengan baik.

5. Atap

Rangka atap dibuat dari kayu kualitas baik dengan ukuran sebagai berikut:

- a. Balok tarik 3/10
- b. Tiang makelar 5/8
- c. Kaki kuda-kuda 5/8
- d. Balok skor 3/10
- e. Gording 5/8
- f. Listplank 2/20

Untuk menutup atap dipakai atap seng BJLS warna (pabrikan).

6. Plafon

Rangka plafond dibuat dari kayu berkualitas baik, pembagian rangka plafond 120 x 120 sedangkan penutup plafond dibuat triplek dengan ketebalan 3,8mm.

7. Pintu dan jendela

Pintu dipasang pintu panel dari kayu berkualitas baik, dipasang memakai engsel 4 inchi tiga buah dilengkapi kunci dua slaag. Untuk jendela di pasang jendela panel kayu dengan kaca bening 5mm, dipasang memakai engsel 2 inchi 2 buah dan dilengkapi grendel 2 buah serta hak angin 2 buah.

8. Finishing

Dinding serta rangka rumah diberi cat air dengan tiga kali sapu sampai dengan berwarna rata. Untuk pintu, jendela serta listplank terlebih dahulu diplamir sebelum dicat, pengecatannya memakai cat minyak tiga kali sapu sampai rata warnanya.

Dalam pengerjaan bangunan rumah layak huni anggaran yang diperlukan satu unit rumah 85 juta, tahapan yang pertama dilakukan yaitu pengerjaan pondasi, dalam pengerjaan pondasi yang digunakan batu, pasir, besi, semen, dan tanah untuk penimbunan pondasi, anggaran yang di gunakan 14 juta. Tahap yang kedua yaitu pemasangan dinding, dalam pemasangan dinding yang digunakan semen, batu, besi, dan pasir, anggaran yang digunakan 12 juta. Tahapa yang ketiga yaitu pemasangan atap, alat yang di gunakan yaitu paku, broti, papan, seng, anggaran yang digunakan 14 juta. Tahapan yang keempat pemasangan lantai, alat yang digunakan pasir, semen, keramik, anggaran yang digunakan 10 juta. Tahapan yang kelima yaitu pemasangan pelapon, alat yang digunakan paku dan teriplek, anggaran yang digunakan 3 juta. Tahapan yang keenam yaitu pemasangan jendela dan pintu, alat yang digunakan bahan jendela, bahan pintu,

baut, engsel, dan alat-alat lain, anggaran yang digunakan 6 juta. Tahapan yang ketujuh yaitu pengecatan dinding, anggaran yang digunakan 2 juta. Anggaran 85 juta ini juga digunakan untuk upah tukang bangunan dan masyarakat yang terlibat yaitu sebanyak 20 juta, dan untuk alat transportasi dan untuk membeli kran, alat-alat lampu, upah pemasangan listrik sebanyak 4 juta.

Mekanisme penyelenggaraan kegiatan pembangunan rumah sederhana layak huni ini di Kepenghuluan/Kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat di laksanakan dengan cara swakelola oleh masyarakat Kepenghuluan/Kelurahan, dengan demikian masyarakat adalah pelaku utama pembangunan Pemerintah.

Untuk pelaksanaan program ditingkat Kepenghuluan/Kelurahan ditetapkan Kelompok Masyarakat (POKMAS) yaitu:

1. Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di Kepenghuluan /kelurahan.
2. Mengidentifikasi /memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di Kepenghuluan /Kelurahan secara komprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif.
3. Menandatangani kontrak kerja dengan pengguna anggaran.
4. Menyusun rencana kegiatan yang ada difasilitasi oleh konsultan.
5. Mengajukan permohonan pencairan dana dengan di lengkapi data-data pendukung yang di persyaratkan oleh pengguna anggaran.
6. Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh konsultan dan dijadikan acuan untuk penentuan biaya

kegiatan serta tidak melampaui pagu anggaran untuk setiap unit kegiatan.

7. Mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan dalam melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penggunaan dana (LPD) yang di lengkapi dengan bukti berupa kwitansi dan faktur pembelian bahan material dan upah.
8. Bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan.
9. Pokmas tidak dibenarkan menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga (merupakan sub pelaksanaan kegiatan).
10. Pokmas harus mengerjakan sendiri dengan melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan program rumah layak huni di kabupaten Rokan Hilir dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa Kabupaten Rokan Hilir Riau yaitu:

1. Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah masyarakat sehingga di peroleh dukungan dari masyarakat (acceptabel). hal ini berlaku baik pemilihan lokasi dan penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pengadaan maupun pada penetapan mekanisme pengelolaan prasarana kepenghuluan/kelurahan yang terbangun.
2. Penyelenggaraan kegiatan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (transparan) melalui penyediaan

media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah di akses masyarakat.

3. Penyelenggaraan kegiatan harus dapat di pertanggung jawabkan (accountable), dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan biaya, dan ketepatan mutu pekerjaan.
4. Penyelenggaraan dapat memberikan manfaat kapa masyarakat secara berkelanjutan (sustainable) yang di tandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana kepenghuluan/ kelurahan yang mandiri oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni ada beberapa hal positif yaitu menguatkan potensi pemerintah desa dalam permasalahan rumah layak huni, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengatasi rumah layak huni, meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga miskin, menumbuh kembangkan semangat gotong royong. Walaupun demikian ada hal positif ternyata program ini tidak terlepas dari beberapa hal yang bersifat negatif yaitu terjadinya kesalah pahaman antara masyarakat miskin yang persyaratannya lengkap dengan Kepala Desa karena belum mendapatkan bantuan, dan karena lama menunggu pendapatan program bantuan rumah layak huni masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan program bantuan rumah layak huni dapat menimbulkan kecemburuan antara miskin yang belum menerima kepada yang sudah menerima bantuan program bantuan rumah layak huni.

Adapun prasurve sementara program bantuan rumah layak huni di desa Siarang-arang mendapatkan bantuan rumah sebanyak 15 unit dari tahun 2010-2020. Padahal bantuan itu sangat di harapkan masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak untuk di huni. Berdasarkan kriteria di atas maka fenomena yang terlihat yaitu:

1. Ada masyarakat miskin yang berkategori persyaratannya terpenuhi belum mendapatkan bantuan rumah layak huni karena diketahui komunikasi penerima bantuan rumah layak huni melalui sosialisasi bagi masyarakat yang dilakukan secara langsung oleh dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rokan Hilir, melainkan data bantuan saja sebatas laporan keluarga miskin dari kepala dusun, RW dan RT, sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui adanya bantuan rumah layak huni ini.
2. 10 tahun pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Desa Siarang-Arang dari 101/kk miskin dari data diatas, ternyata baru 15 unit bantuan diterima oleh Desa Siarang-Arang dan masih banyak masyarakat miskin yang berharap untuk mendapat bantuan.
3. Dapat kita lihat pada Perbub Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 salah satu tujuan Perbub yaitu memberikan peluang kerja kepada masyarakat Kepenghuluan/Kelurahan dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi. Dalam pengerjaan Program Rumah Layak Huni dilakukan dengan gotong-royong oleh masyarakat di Kepenghuluan/Kelurahan,

dimana tukang yang ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan rumah dibantu oleh kelompok lain. Hal ini menjadi kendala dalam pembangunan Rumah Layak Huni karena kelompok lain juga memiliki kesibukan sendiri.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa fenomena-fenomena yang penulis dapat maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni yang kemudian dijabarkan **“Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dengan didasari masalah-masalah yang terjadi dan dijadikan fenomena maka dapat dirumuskan masalah penelitian **“Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir?”**

C. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian

Ada pun tujuan peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui proses dari pelaksanaan program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat teoritis

Untuk memperbanyak ilmu pengetahuan dalam dunia akademis khususnya ilmu administrasi publik dan mempertajam teori-teori yang ada dalam dunia akademis khususnya mengenai teori Implementasi kebijakan publik, serta mengembangkan ilmu yang di dapatkan selama perkuliahan.

2. Manfaat Ekonomis

Yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi maupun referensi bagi penelitian selanjutnya pada penelitian yang sama.

3. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat di jadikan informasi tambahan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk melakukan pembenahan terhadap penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan rumah layak huni.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Menurut Maksudi (2017:25) di Indonesia administrasi merupakan proses kegiatan dengan bantuan berbagai sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya sering didefinisikan administrasi dalam arti sempit adalah sering dimaknai sebagai kegiatan tulis-menulis, catat-mencatat, mengetik, surat-menyurat, dan administrasi dalam arti luas yaitu sebagai proses kerja sama saat penyelenggaraan kegiatan yang di lakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan secara efisien dan efektif.

Menurut Ali (2011:19) administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi awalan pe dan akhirnya an pada setiap arti maka semuanya mengandung maksud adanya pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan.

Robbins (dalam Maksudi, 2017:27) “Administration is the universal process of efficiency getting activities completed with and through other people”. Robbins memahami administrasi ini sebagai keseluruhan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan secara efisien melalui kerja sama dengan orang lain.

Menurut Syafri (dalam Fitriana: 2020) mengatakan administrasi dalam arti sempit adalah merupakan kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan

(pengarsipan) pengiriman berbagai informasi yang diterima atau dikeluarkan oleh suatu organisasi/institusi.

Waldo (dalam Maksudi, 2017:27) “Administrasi adalah suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalisasi yang tinggi”. Siagian (dalam Maksudi, 2017:28) “Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah di ambil dan pelaksanaan itu pada umumnya yang di lakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Hal lain yang dapat di cermati dari sejumlah defenisi adalah bahwa prioritas utama administrasi terciptanya tingkat efektifitas dan efesiensi yang optimal, baik dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas utama dan aktivitas penunjang maupun dalam mencapai upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Administrasi publik di Indonesia dikenal dengan istilah Administrasi Negara yakni salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan (Kasim, 1993: 21). Menurut Gardon (dalam Kasim 1993: 22) Administrasi Publik adalah studi tentang seluruh proses, organisasi dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang di keluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan. Defenisi ini secara implisit menganggap administrasi public terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik.

Waldo (dalam Maksudi 2017:223) *pertama*, bahwa administrasi publik merupakan proses dimana sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (seperti modal, sarana dan parasarana, teknologi) diorganisir (organisasi) dikelola

(fungsi manajemen) guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. *kedua*, administrasi publik suatu seni dan ilmu. Suatu seni (*art*), administrasi publik merupakan keterampilan dalam praktik yang ditujukan untuk mengatur hubungan-hubungan dan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Sedangkan, administrasi publik merupakan disiplin ilmu (*science*) yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik. Willoughby (dalam Maksudi 2017:225) berpendapat bahwa “Administrasi publik adalah fungsi untuk menjalankan hukum dengan sebenarnya seperti yang dinyatakan oleh badan-badan legislatif dan ditafsirkan oleh badan-badan yudikatif pemerintah.”

Menurut Fayol (dalam Zulkifli & Moris) mengemukakan 14 prinsip administrasi yaitu:

- a. Pembagian kerja
- b. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
- c. Disiplin
- d. Kesatuan perintah
- e. Kesatuan arah atau tujuan
- f. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum (organisasi) di atas kepentingan pribadi
- g. Pengupahan atau pengajian
- h. Sentralisasi
- i. Skala hirarki
- j. Tatatertib
- k. Keadilan

- l. Stabilitas jabatan
- m. Prakarsa atau inisiatif
- n. Solidaritas atau kelompok kerja.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses suatu organisasi maupun individu dalam melaksanakan tujuannya sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan seluruh proses kebijakan publik.

2. Konsep Organisasi

Menurut Zulkifli (2009:38) konsep organisasi dalam paragraf ini adalah sebagai wadah pelaksanaan kerjasama sejumlah personil, dan juga mencakup rangkaian aktivitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi. Penelaahan terhadap prinsip-prinsip organisasi ini juga dikaitkan dengan aspek-aspek studi administrasi dan manajemen.

Menurut Siswanto (2013:73) organisasi didefinisikan sebagai kelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk merealisasikan tujuan bersama. Didalam organisasi mengandung tiga elemen yaitu:

- a. Sekelompok orang
- b. Interaksi dan Kerjasama
- c. Tujuan bersama

Menurut Usman dkk (dalam Maksudi, 2017:35) dari asal kata organisasi dari bahasa latin, *organum* yang berarti alat, bagian-bagian anggota badan.

Pengertian lain, organisasi berasal dari kata *organizare* yang berarti mengatur atau menyusun. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya “*Organization*” yang berarti hal yang “*mengatur*” dan kata kerjanya “*Organizing*” berasal dari bahasa Latin “*organzre*” yang mengatur atau menyusun. Pengertian dari asal kata organisasi tersebut, maka organisasi dapat di pahami sebagai tempat penyusunan dan pengaturan dari berbagai bagian sehingga merupakan kesatuan kerja sama yang teratur untuk mencapai tujuan.

Menurut Hamim (2005:24) menjelaskan bahwa organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompoknya harus dilakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa memberikan terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Robbin (dalam Maksudi 2017:36) menegaskan bahwa organisasi adalah bentuk lembaga yang dominan dalam masyarakat kita. Organisasi sebagai proses dan dinamakan pula *organisasi dinamis*. Artinya, organisasi juga bersifat hidup, berkembang, bergerak, dan berubah. Jadi organisasi tidak mati, tidak *mandeg*, dan juga tidak bersifat statis (Soedjadi, dalam Maksudi 2017:42).

Dari beberapa pendapat ahli diatas, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa organisasi adalah wadah atau tempat dilakukannya proses kerjasama oleh sekelompok orang.

3. Konsep Manajemen

Stoner (dalam Zulkifli 2009:17), berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan

pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah di tetapkan.

Terry (dalam Zulkifli 2009:18) mendefenisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planing, organizing, actuating, dan controlling* dimana di masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan di ikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Menurut Winardi (2010:76) mengemukakan manajemen adalah merupakan sebuah proses khusus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan (*actuating*) dan tindakan pengawasan (*controlling*) yang dilaksanakan untuk mendeterminasikan dan mencapaikan sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lainnya.

Menurut Hasibuan (2014:1) manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar-dasar manajemen yaitu:

- a. Adanya kerjasama antar kelompok orang dalam ikatan formal.
- b. Adanya tujuan bersama serta kepentingan Bersama yang akan tercapai.
- c. Adanya pembagian kerja, tugas dan tanggungjawab yang teratur
- d. Adanya sekelompok orang dalam dan pekerja yang akan dikerjakan

Waldo (dalam Zulkifli 2009:20), manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasionil dalam suatu sistem

administrasi. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau penggerakan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” mengelola sedang pelaksanaannya di sebut manager atau pengelola. (Terry dan Rue, dalam Maksudi 2017:79).

Menurut Gie (dalam Zulkifli & Moris 2014:18) ada enam fungsi utama manajemen yaitu:

- a. Perencanaan
- b. Pembuatan keputusan
- c. Pengarahan
- d. pengkoordinasian
- e. Pengontrolan
- f. penyempurnaan

Kemudian menurut darwis dkk (dalam Wedayanti 2019:3) yang mengatakan manajemen lebih menggunakan pengdayagunaan sumber daya manusia lainnya, oleh karena itu manajemen sangat diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mendayagunakan sumber daya yang ada, maka dengan demikian di perlukan konsep manajemen sumber daya manusia.

Dari beberapa uraian defenisi manajemen menurut parah ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa manajemen adalah proses dimana seorang pemimpin mengelola sebuah organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang di miliki organisasi.

4. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (dalam Solichin Abdul Wahab 2017:14) yang menyatakan bahwa kebijakan publik ialah “*whatever governments choose to do or not to do*” (pilihan tindakan apa pun yang di lakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah).

Menurut Koryati (2005:7) mengemukakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan.

Nugroho (2004:50) kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangundaya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan. Menurut prancis, Lemieux (dalam Solichin Abdul Wahab 2017:15) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: “*the product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationships are structured. The entire process evolves over time*” (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecah masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).

Beberapa pendapat ahli di atas peneliti dapat menyimpulkan Kebijakan publik adalah sebagai serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-

hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Partowidagdo (dalam Anwar:2012) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Menurut Anderson (dalam zaini & raden 2015:13) jenis kebijakan publik ada dua belas yaitu:

- a. Substantive policies yaitu kebijakan yang berkaitan dengan materi, isi atau subjek matter kebijakan. Misalnya kebijakan dalam bidang tenaga kerja, Pendidikan, perdagangan dan hukum.
- b. Procedural policies, kelompok, mana dan pihak mana yang terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Misalnya merancang membuat undang-undang di bidang tenaga kerja, siapa saja dan pihak mana yang terlibat didalamnya.
- c. Distributive policies, kebijakan yang memberikan pelayanan atau keuntungan kepada sejumlah atau sekelompok masyarakat. Misalnya

kebijakan distributive di bidang ketenaga kerjaan adalah pemberian pelatihan pada Angkatan kerja.

- d. Redistributive policies, kebijakan yang arahnya memindahkan hak, pemilikan atau kepunyaan kepada masyarakat. Misalnya pemindahan hak dari kalangan mampu kepada yang tidak mampu. Contoh kebijakan ini memberlakukan pajak yang lebih besar dari barang barang impor, berbeda dengan produksi dalam negeri. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
- e. Regulatory policies, kebijakan yang berkenaan dengan pembatasan atas tindakan terhadap seseorang atau sekelompok orang. Misalnya pembatasan penjualan obat-obat tertentu, pembatasan pada pemakai jalan pada jalur tertentu.
- f. Selfregulatory policies, kebijakan ini hampir sama dengan regulatory policies, hanya bedanya kebijakan ini di dukung oleh seseorang atau kelompok orang yang punya kepentingan dengan kebijakan tersebut. Misalnya izin perdagangan, kerjaan, mengebudi, dan lainnya.
- g. Material policies, kebijakan yang berkaitan dengan sumber martial kepada penerimanya dengan membayar beban atau kerugian kepada yang mengalokasikan. Misalnya pemberlakuan pemberian upah minimum kepada pekerja.
- h. Symbolice policies, kebijakan jenis ini tidak memaksa kepada halayak, karena dilaksanakan tidaknya kebijakan tersebut tidak terlalu besar dampaknya kepada masyarakat. Seringkali kebijakan simbolis ini tidak

diikuti oleh masyarakat, karena sebagai simbol saja. Misalnya kebijakan iuran TVRI, radio dan sebagainya.

- i. Kolektive good policies, kebijakan tentang barang-barang dan pelayanan guna memenuhi kepentingan orang banyak, jika di berikan kepada seseorang, kelompok orang, haruslah juga menyediakan untuk semua orang. Contoh belajar wajib belajar sembilan tahun.
- j. Private good policies, kebijakan yang menyediakan kebutuhan tertentu kepada masyarakat atau publik yang membutuhkan, tetapi masyarakat tersebut harus menyediakan biaya untuk mendapatkan pelayanan. Contoh kebijakan rumah sakit, tempat-tempat hitungan, rekreasi dan lainnya.
- k. Liberal policies, kebijakan yang menuntut kepada pemerintah untuk mengadakan perubahan. Perubahan tersebut mengarah kepada pengurangan ketidak merataan dalam kehidupan masyarakat. Ujud dalam pemeritaan ini mengadakan koreksi atas kelemahan pada aturan yang ada pada masyarakat, serta berupaya meningkatkan program ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
- l. Conservatife policies, kembalikan dari kebijakan liberal. Kebijakan liberal policies menuntut adanya perubahan, tapi dalam kebijakan ini malahan mempertahankan yang ada secara alamiah dan tidak rekayasa. Bahkan perubahan diupayakan diperlambat untuk perubahannya.

Menurut Anderson (dalam zaini & raden 2015:18) mengatakan bahwa ada lima langkah dalam proses kebijakan publik, yaitu agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, dan policy assessment/evaluation.

Menurut Thomas R. Dye (dalam zaini & raden 2015: 18) bahwa proses kebijakan publik meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah kebijakan (identification of policy problem) dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan atau demands atas tindakan pemerintah.
- b. Penyusunan agenda (agenda setting) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan atas apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
- c. Perumusan kebijakan (policy formulation) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislative.
- d. Pengesahan kebijakan (legitimizing of policy) melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekanan, presiden dan kongres.
- e. Implementasi kebijakan (policy implementation) dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganissai.
- f. Evaluasi kebijakan (policy evaluation) dilakun oleh lembaga pemerintah sendiri. Konsultan di luar pemerintah, pers dan masyarakat (publik).

5. Konsep Implementasi kebijakan

Nugroho (2004: 158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Menurut Wahab (2017:125) implementasi kebijakan itu merupakan suatu aktivitas yang paling penting. Tetapi, tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa setiap kebijakan itu akan terimplementasi dengan sendirinya, seolah aktivitas implementasi kebijakan tersebut menyangkut sesuatu yang tinggal jalan.

Menurut Awang (2010:78) menjelaskan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, merupakan fokus implementasi kebijakan yaitu kejadian yang timbul setelah disahkannya pedoman kebijakan yang mencangkup, baik usaha untuk mengadmisitrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut George C Edward III (dalam Agustino 2020:154) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah direct and indirect impact on implementation. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Menurut winarno (2012:187) implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokok yakni memberikan pelayanan publik (publik services) kepada masyarakat.

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Agustino 2020:159) pendekatannya dikenal dengan nama implementation as a political and administrative process.

Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapainya atau tidak tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu infak atau efeknya kepada masyarakat secara individu atau kelompok, dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerima kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Agustino 2020:163) model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan a framework for policy implementation analysis. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

- a. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap
- b. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat
- c. Variabel di luar UU yang mempengaruhi implementasi

Menurut Thomas R. Dye (dalam Agustino 2020:168) sering disebut juga dengan istilah model implementasi interaktif. Model ini menganggap pelaksanaan

kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan.

Menurut Jones (dalam Agustino 2020:169) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kegiatan terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama yaitu:

- a. Organisasi: pembentukan atau penata ulang sumber daya, unit, atau metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
- b. Interpretasi: menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c. Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino 2020:150) disebut dengan istilah A Model of The Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel.

Ada enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu:

- a. Ukuran dan Tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realisasi dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksanaan kebijakan. Ketika

ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Dalam melaksanakan program implementasi kebijakan pasti adanya pengukuran tujuan, yang dimaksud dengan pengukuran yaitu tepatnya pelaksanaan tersebut, tepat untuk pengukuran waktu pelaksanaan dalam membangun rumah layak huni. Sedangkan tujuan kebijakan yaitu untuk memberi fasilitas yang lebih atau bantuan rumah yang lebih layak, dan memberi masyarakat lain yang tidak dapat bantuan rumah layak huni sebagai tenaga kerja dalam pembangunan bantuan rumah layak huni.

b. Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia sumber daya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menentukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan oleh kebijakan yang telah di tetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk di harapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu di perhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak

sedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidak berhasilan suatu implementasi kebijakan.

Menurut Sadili Samsudin Sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi.

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang dengan sumber daya baik dengan sumber daya manusia, finansial dan waktu. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Menurut Mathis dan Jackson sumber daya manusia adalah suatu rancangan sistem-sistem formal dalam suatu organisasi untuk memastikan penggunaan bakat dan potensi manusia secara efektif dan efisien agar bisa mencapai tujuan organisasi. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal diatas kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya memberikan upaya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat.

Dalam suatu kebijakan implementasi program bantuan rumah layak huni yang bertanggung jawab atas hal ini harus menentukan sumber daya apa saja yang terlibat dalam program ini, dan yang terlibat dalam program ini yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan waktu. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang program ini yaitu Bupati, Kepala Dinas, Kepala Bidang Pemukiman, KASUBID Pengembangan Kawasan Pemukiman, KASUBID Tata Pemukiman Sumber Daya, Camat, Sekretaris Camat, PPTK, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Konsultan, POKMAS, Dusun, LPM, RT, RW, masyarakat telah menerima dan masyarakat yang belum menerima. Sumber daya finansial dan waktu adalah menentukan keuangan yang harus di cairkan dalam program ini berdasarkan unit rumah, tipe rumah dengan sejalannya waktu. Maka dari itu program ini harus mencapai tujuan dinas dan melakukan pendataan penerima bantuan agar efektif dan efisien.

c. Sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementator laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui

(bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Sikap ini di pengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Metter dan Van Horn menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (befiltired) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan.

Dalam melaksanakan kebijakan keinginan atau kesepakatan palekasana untuk melaksanakan kebijakan, implementor harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan atau seperti yang sudah ditetapkan kebijakan. Maka dalam program bantuan rumah layak huni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mengambil keputusan agar pengimplementasian program ini berjalan secara efektif dan efisien. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman juga melakukan pengawasan terhadap program ini agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan

d. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu juga sebaliknya. Komunikasi adalah sebuah proses

memungkinkan seseorang (komunikator) untuk menyampaikan rangsangan, dengan tujuan untuk dapat mengubah perilaku orang lain (komunikan).

Agar kebijakan publik dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Metter (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus di pahami oleh para individu. Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan harus di komunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisiten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

Dalam mengimplementasi program bantuan rumah layak huni pasti adanya komunikasi agar masyarakat tahu bahwa adanya program bantuan rumah layak huni. Komunikasi yang dapat di sampaikan kepada masyarakat yaitu dalam bentuk sosialisasi. Menurut (Agustino: 176) Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan berbagai hal yang dilakukan dan di tempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang di formulasinya. Dalam konteks program bantuan rumah layak huni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman melakukan sosialisasi peraturan dalam program bantuan rumah layak huni dan sosialisasi persyaratan penerima bantuan rumah layak huni kepada Kepala desa dan masyarakat yang tergolong miskin.

e. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan

Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Menurut George Soul ekonomi adalah pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat khususnya dengan usaha memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut Purba (2002:13-14) lingkungan sosial adalah wilayah yang menjadi tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial antara berbagai kelompok dan pranatanya dengan simbol dan nilai juga norma yang telah ditetapkan juga berkaitan dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan atau lingkungan buatan (tata ruang).

Menurut Peterson (dalam hidayat:2011) mengatakan bahwa politik lingkungan adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamika antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam didalam masyarakat dalam skala dari individu kepada transnasional secara keseluruhan.

Dalam pengimplementasian program ini dari konteks lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang telah dijelaskan diatas Kepala Desa

melakukan musyawarah untuk melihat bagaimana respon masyarakat terhadap program ini dan melihat kebersamaan masyarakat agar program ini mencapai tujuan.

Menurut Ali & Imam (2015:53) proses implementasi itu sendiri dimulai saat sebuah kebijakan itu ditetapkan atau memiliki payung hukum yang sah dan dapat dipertanggung jawab. Kemudian tahap-tahapan implementasi akan dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan, membantu organisasi, mengerahkan orang atau sumber daya manusia, teknologi, menetapkan prosedur, dan lain sebagainya dengan maksud agar tujuan dari pembuatan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat dapat terpecahkan atau terselesaikan dengan baik sesuai harapan pembuatan kebijakan.

Menurut Van metter dan Van Horn (dalam zaini & raden 2015:54) merumuskan proses implementasi ini sebagai “those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectivies set forth in prior policy decision” (Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Menurut Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Wahab, 2005:18) berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada proses implmentasi. Variabel- variabel yang dimaksud dapat diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu:

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
- b. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya, dan
- c. Pengaruh langsung sebagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang memuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

Menurut George Edward III (Winarno, 2012: 177) mengemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan variabel-variabel pelaksanaan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Kecendrungan dari Pelaksanaan Kebijakan
- d. Struktur Birokrasi

Menurut Water Wiliam (dalam Ismail, 2007:132) implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program dengan melalui tiga pilar sebagai berikut:

- a. Organisasi: pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
- b. Interpretasi: menafsirkan agar program (seringkali dalam status menjadi rencana atau pengarahannya yang tepat dan dapat di terima serta dilaksanakan).
- c. Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Menurut Smith (dalam Tachjan, 2006: 37) dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (Tension) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut, indikator tersebut ialah:

- a. Kebijakan yang di Idealkan
- b. Kelompok Sasaran
- c. Organisasi Pelaksanaan
- d. Faktor Lingkungan

Menurut Ali & Imam (2015:57) pada perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan ada dua model pendekatan untuk memahami implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Top-down, dalam pendekatan top-down dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top-down bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuatan kebijakan harus dilakukan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Dengan kata lain top-down adalah sejauh mana Tindakan pelaksana sesuai dengan prosedur atau tujuan yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

b. Bottom-up, purwanto dan sulistyastuti (dalam zaini & raden 2015: 82) menganjurkan pendekatan penelitian dengan pendekatan betton-up dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

- Memetakan stakeholder (aktor dan organisasi) yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level terbawah.
- Mencari informasi dari para aktor tersebut tentang pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan apa kepentingan mereka terlibat dalam implementasi.
- Memetakan keterkaitan jaringan para aktor pada level terbawah tersebut dengan aktor-aktor pada level atasannya.
- Peneliti bergerak keatas dengan memetakan aktor yang lebih tinggi dengan mencari informasi yang sama.
- Pemetaan dilakukan terus sampai pada level tertinggi (para policy maker).

6. Konsep pemberdayaan

Widjaja (2017:77) Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi jajaran bawah. Inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.

Menurut suhendra (dalam mery dkk: 2018) pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutive dengan keterlibatan semua potensi.

Berikutnya pemberdayaan menurut Jim Ife meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (empowerment aims to increase the power of disadvantage).

Menurut Vionasari (2019) pemberdayaan masyarakat merupakan istilah konsep baru dalam konsep pembangunan berkelanjutan di dunia ketiga. Konsep ini sering kali menimbulkan persepsi yang sama dengan istilah pembangunan masyarakat karena pada pelaksanaannya sering terjadi tumpang tindih. “pemberdayaan masyarakat merupakan strategi besar dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people based development*)”. Pendekatan ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya internal dan non internal yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

Menurut Suharto (2009) pemberdayaan adalah sebuah proses yang menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Secara konseptual, menurut Suharto (2005:58) bahwa pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment, berasal dari kata “power” kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kebebasan, dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat

meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.

Untuk itu, ada beberapa langkah yang harus diperhitungkan dalam pemberdayaan masyarakat miskin Nugroho (2001:195-197) yaitu:

- a. Pemberdayaan masyarakat merupakan prasarat mutlak bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk menekan perasaan ketidak berdayaan (impotensi). Masyarakat miskin bisa berhadapan dengan struktur sosisl dan politis.
- b. Setelah kesadaran kritis muncul, upaya memutus hubungan eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan.
- c. Tanamkan rasa kesamaan (egalitarian) dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi sebagai penjelmaan dari konstruksi sosial.
- d. Merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh.
- e. Perlu pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin.
- f. Redistribusi infrastruktur pembanguna yang lebih merata.

Sumodiningrat (dalam dwi dkk:2013) berpendapat bahwa pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga jalur yaitu:

- a. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat yang berkembang (enabling).
- b. Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (em powering).
- c. Memberikan perlindungan (protecting).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan. Menurut Sulistiyani (2004:77) tentang pemberdayaan bahwa pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh dan atau proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya.

Menurut Hany (2001) upaya pemberdayaan (mengembangkan masyarakat dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan penjabaran baik secara lisan maupun tulisan runtutan logika (alur cerita dan cara pandang) seseorang tentang keterkaitan atau hubungan atau pengaruh salah satu atau sejumlah aspek dengan satu kondisi fenomena tertentu yang sedang dan dijadikan objek pengamatan sehubungan dengan pelaksanaan program bantuan rumah layak huni, untuk memenuhi maksud ini maka selalu dipergunakan sebagai pedoman utama penjabaran kerangka pemikiran ini adalah tingkat pemahaman terhadap kepustakaan dan teori objek pengamatan.

Gambar II.1: Kerangka pikir tentang Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.



Sumber: modifikasi Penelitian 2020.

C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah penelitian ini dan supaya tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terhadap konsep yang di gunakan, maka adapun konsep operasional yang di jabarkan sebagai berikut:

1. Administrasi adalah proses pembangunan rumah layak huni di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir
2. Organisasi adalah panitia-panitia yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Desa Siarang-arang.
3. Manajemen adalah sebuah proses khusus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan terhadap pemeriksaan berkas kelengkapan berkas untuk bantuan rumah layak huni di Desa Siarang-Arang.
4. Kebijakan publik adalah Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sebagai payung hukum dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni didesa Siarang-arang.
5. Implementasi adalah pelaksanaan program bantuan rumah layak huni didesa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.
6. Ukuran dan tujuan kebijakan adalah tepatnya pelaksanaan pengukuran waktu pembangunan rumah dan tercapainya tujuan berupa fasilitas yang layak untuk masyarakat.

7. Sumber daya adalah orang yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang Pemukiman, KASUBID Pengembangan Kawasan Pemukiman, KASUBID Tata Pemukiman Sumber Daya, Camat, Sekretaris Camat, PPTK, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Konsultan, POKMAS, Dusun, LPM, RT, RW, masyarakat telah menerima dan masyarakat yang belum menerima.
8. Sikap atau kecendrungan (disposition) para pelaksana adalah Dinas PERKIM mengambil keputusan dalam pelaksanaan program agar efektif dan efisien.
9. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana adalah sosialisai peraturan dan persyaratan penerima bantuan rumah layak huni.
10. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik adalah kondisi ekonomi masyarakat, dinamika politik lokal dan nilai-nilai sosial masyarakat.
11. Pemberdayaan adalah memberi bantuan rumah dan pekerjaan kepada masyarakat didesa Siarang-arang.

D. Operasional Variabel

Tabel II.1: Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Konsep	Variabel	Indikator	Item dinilai	Skala
Implementasi adalah sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi, Van Metter dan Van Horn.	Pelaksanaan program bantuan rumah layak huni.	1. Ukuran dan tujuan kebijakan	a. Terwujudnya RLH bagi masyarakat. b. Menyediakan akses ekonomi. c. Kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Efektif • Cukup efektif • Kurang efektif
		2. Sumber daya.	a. Manusia. b. Manggaran. c. Material d. Teknologi e. Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Efektif • Cukup efektif • Kurang efektif
		3. Sikap dan kecenderungan (disposisi) para pelaksana	a. Keberpihakan pengambilan keputusan. b. Pengawasan pelaksanaan bantuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Efektif • Cukup efektif • Kurang efektif
		4. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan.	a. Sosialisasi peraturan. b. Koordinasi. c. SOP.	<ul style="list-style-type: none"> • Efektif • Kurang efektif • Kurang efektif
		5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.	a. Ekonomi. b. Sosial. c. Politik.	<ul style="list-style-type: none"> • Efektif • Kurang efektif • Kurang efektif

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020.

E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Miskin di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu adanya teknik pengukuran yang jelas yang dapat di nilai melalui indikator sebagai berikut:

Efektif : Apa bila semua indikator pada kategori Efektif berada pada rentang skor 67%-100%

Cukup Efektif : Apa bila semua indikator pada kategori Cukup Efektif berada pada rentang skor 34%-66%

Kurang Efektif : Apa bila semua indikator pada kategori Kurang Efektif berada pada rentang skor 0%-33%

Adapun pengukuran indikator sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Efektif : Apa bila semua indikator pada kategori Efektif berada pada rentang skor 67%-100%.

Cukup Efektif : Apa bila semua indikator pada kategori Cukup Efektif berada pada rentang skor 34%-66%.

Kurang Efektif : Apa bila semua indikator pada kategori Kurang Efektif berada pada rentang skor 0%-33%.

2. Sumber Daya

Efektif : Apa bila semua indikator pada kategori Efektif berada pada rentang skor 67%-100%

Cukup Efektif : Apa bila semua indikator pada kategori Cukup Efektif berada pada rentang skor 34%-66%

Kurang Efektif : Apa bila semua indikator pada kategori Kurang Efektif berada pada rentang skor 0%-33%

3. Sikap atau Kecendrungan (disposition) Para Pelaksana

Efektif : Apa bila semua indikator pada kategori Efektif berada pada rentang skor 67%-100%

Cukup Efektif : Apa bila semua indikator pada kategori Cukup Efektif berada pada skor 34%-66%

Kurang Efektif : Apa bila semua indikator pada kategori Kurang Efektif berada pada rentang skor 0%-33%

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana

Efektif : Apa bila semua indikator pada kategori Eektif berada pada rentang skor 67%-100%

Cukup Efektif : Apa bila semua indikator pada kategori Cukup Efektif berada pada rentang Skor 34%-66%

Kurang Efektif : Apa bila semua indikator pada kategori Kurang Efektif berada pada rentang skor 0%-33%

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik

Efektif : Apa bila semua indikator pada kategori Efektif berada pada rentang skor 67%-100%

Cukup Efektif : Apa bila semua indikator pada kategori Cukup Efektif berada pada rentang skor 34%-66%

Kuranf Efektif : Apa bila semua indikator pada kategori Kurang Efektif berada pada rentang skor 0%-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2016:8).

Untuk melihat dan mengetahui serta melukis keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah di sampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang di gunakan adalah penelitian survey. Penelitian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya yang di kumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kuisoner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun sipeneliti dalam membuat daftar pertanyaan kuisoner yang dimaksud di atas untuk disebarkan kepada populasi yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian pada Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dalam Program Bantuan Rumah Layak Huni dimana diketahui Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni belum tepat sasaran terhadap masyarakat miskin.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan, (Sugiyono 2016:80). Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (sugiyono 2016:81). Adapun jumlah seluruh suatu objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang Pemukiman, KASUBID Pengembangan Kawasan Pemukiman, KASUBID Tata Pemukiman Sumber Daya, Camat, Sekretaris Camat, PPTK, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Konsultan, POKMAS, Dusun, LPM, RT, RW, masyarakat telah menerima dan masyarakat yang belum menerima. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.1: Populasi Dan Sampel Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Dinas	1	1	100%
2	Kepala Bidang Pemukiman	1	1	100%
3	KASUBID Pengembangan Kawasan Terpadu	1	1	100%
4	KASUBID Tata Pemukiman Sumber Daya	1	1	100%
5	Camat	1	1	100%
6	Sekretaris Camat	1	1	100%
7	PPTK	1	1	100%
8	Kepala Desa	1	1	100%
9	Sekretaris Desa	1	1	100%
10	Konsultan	1	1	100%
11	POKMAS	1	1	100%
12	Dusun	5	5	100%
13	Ketua LPM	1	1	100%
14	Wakil LPM	1	1	100%
15	RW	13	5	36%
16	RT	39	5	11%
	Jumlah	70	28	35%

Sumber olahan penelitian 2020.

Tabel.III.2: Populasi Dan Sampel Rumah Tangga Miskin Sebagai Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Di Desa Siarang-Arang.

No	Sub populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Masyarakat yang telah menerima	15/kk	15	100%
2	Masyarakat belum menerima	86/kk	16	30%
	Jumlah	101/kk	31	31%

Sumber olahan penelitian 2020.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sudah menerima dan yang belum menerima bantuan rumah layak huni di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling jenuh* atau disebut juga dengan sensus, *sampling jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah jajaran dinas sampai desa dan masyarakat yang telah menerima bantuan rumah layak huni dan yang belum menerima.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah menggali informasi dengan menanyakan tujuan data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang di perlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang di teliti. Adapun

data sekunder berupa Undang-undang terkait Program Bantuan Rumah Layak Huni, buku-buku, jurnal, pendukung penelitian, laporan penelitian yang telah ada, yang di butuhkan terkait dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (sugiyono 2016:224).

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Kuisisioner

Adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden, berupa daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun, untuk dijawab dan dinilai dengan menimbang bahwa responden adalah subjek yang dianggap mengetahui tugas dan pekerjaan, dan apa yang di jawab adalah benar karena mereka terlibat langsung dengan kegiatan menyampaikan daftar pertanyaan yang di letakkan peneliti.

2. Observasi

Adalah pengamatan langsung yang dilakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui secara nyata mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

3. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Selanjutnya hasil analisis tersebut, di ambil beberapa kesimpulan serta di akhiri dengan mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Tabel III.3: Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																				
		Nov/Des				Jan/Mar				Apr/Mei				Jun/Jul				Agus/Sept				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan Penyusunan UP	x	x	X																		
2	Seminar UP				x																	
3	Riset					x	X															
4	Penelitian Lapangan							x	x	X	x											
5	Pengolahan Data dan Analisis											x	x									
6	Konsultasi bimbingan skripsi													x	x	x	x	x				
7	Ujian skripsi																		x			
8	Revisi dan pengesahan skripsi																			x		
9	Pengadaan dan pengesahan skripsi																					x

Sumber: Olahan Data Penelitian 2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Bagan Siapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk kedalam kabupaten Bengkalis. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota Bagan Siapiapi. Tepatnya di jalan mardeka No 58. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.881,59 km² dan penduduk sejumlah 714.497 jiwa (2019). Wilayah Rokan Hilir terletak pada koordinat 1 14 sampai 2 45 lintang utara dan 100 17 hingga 101 21 bujur timur. Wilayah kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan wilayah Utara Selat Melaka, Timur Kota Dumai, Selatan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis dan, Barat Kabupaten Labuhan Batu Sumatra Utara.

Wilayah daratan kabupaten Rokan Hilir sebagian dasar merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 s/d 100 meter di atas permukaan laut. Pada daerah pesisir pantai memiliki ketinggian antara 0 s/d 6 meter dpl dan dipengaruhi pasang surut air laut. Untuk daerah sepanjang aliran sungai, pada umumnya memiliki ketinggian antara 0 s/d 30 meter dpl. Rokan Hilir terbagi dalam 18 kecamatan dan 172 desa/kelurahan. Setelah pembentukan kecamatan Tanjung Medan pada tanggal 14 februari 2014, berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2014, maka wilayah kabupaten Rokan Hilir menjadi 18 Kecamatan yakni: Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Tanah Putih Tanjung,

Melawan, Tanah Putih, Kubu, Bagan Sinembah, Pujud, Simpang Kanan, Pasir Limau Kapas, Batu Hampar, Rantau Kopar, Pekaitan, Kubu Babussalam, Balai Raja, Bagan Sinembah Raya dan Tanjung Medan.

B. Sejarah Singkat Kecamatan Pujud

Masyarakat Pujud awalnya berasal dari desa Rantau benuang sakti kecamatan kepenuhan kabupaten Rokan Hulu, karena perkembangan zaman maka dari tahun ketahun terjadi pertambahan penduduk yang signifikan baik secara natalitas maupun dengan cara pindah datang dari berbagai daerah di Indonesia ada suku jawa, batak, minang, nias dan lain-lain sehingga masyarakat pujud menjadi heterogen. Pada tahun 2002 maka ditetapkanlah kecamatan pujud sebagai kecamatan yang defenitif berdasarakan peraturan daerah kabupaten rokan hilir nomor 23 a tahun 2002 tentang pembentukan kecamatan sinaboi, pasir limau kapas, pujud dan simpangkanan.

Kecamatan Pujud adalah sebuah kecamatan yang ada di kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Di kecamatan Pujud memiliki jumlah masyarakat 8.924/KK dan juga memiliki 16 kepenghuluan/kelurahan yakni: Air Hitam Babussalam Rokan, Kasang Bangsawan, Kasang Bangsawan Muda, Pematang Genting, Perkebunan Siarang-Arang, Pujud, Pujud Selatan, Pujud Utara, Siarang-Arang, Siarang-Arang Rokan, Sukajadi, Sukamulya, Sungai Pinang, Teluk Nayang, Ulak Kemahang. Sedangkan batas sebelah utara Tanah Putih, sebelah selatan Bonai Darussalam Rokan Hulu, sebelah barat Tanjung Medan, sebelah timur Sedinginan.

C. Sejarah Singkat Desa Siarang-Arang

Pada awal mulanya kepenghuluan siarang-arang konon katanya menurut para orang-orang tua tunduk dibawah kerajaan Rokan dan kerajaan Tambusai, kemudian setelah berakhirnya masa kerajaan jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia yang diProklamirkan oleh tokoh bangsa Soekarno Hatta, kepenghuluan siarangarang dipimpin oleh seorang datuk penghulu yang bernama Rasyid yang saat itu menjabat sebagai penghulu kampung selama 15 tahun dari tahun 1916 s/d 1930, setelah meninggal bapak Rasyid kepenghuluan dipimpin oleh Tajau yang menjabat sebagai penghulu kampung selama 20 tahun dari tahun 1930 s/d 1950, setelah meninggalnya bapak Tajau kepemimpinan kepenghuluan pindah kepada bapak Jamaluddin dari tahun 1950 s/d 1970 dan dilanjutkan dengan bapak Aban Suharni dari tahun 1970 s/d 1994 setelah berakhirnya masa jabatan bapak Aban Suharni diadakan pemilihan kepala desa maka terpilihlah bapak Drs.A.Razak sebagai kepala desa dari tahun 1994 s/d 2002, berakhirnya kepemimpinan Drs.A.Razak untuk mengisi kekosongan kepemimpinan kepala desa saat itu ditunjuk oleh instansi yang berwenang Syamroh.Zen sebagai penjabat sementara untuk menjabat untuk menjabat kepala desa pada tahun 2002 s/d 2004 kemudian dilanjutkan pemilihan penghulu tahun 2004 maka yang terpilih pada saat itu Jumari dan kepemimpinan penghulu dipegang oleh bapak Jumari dari tahun 2004 s/d 2010, setelah berakhir penghulu Jumari diadakan pemilihan kembali yang terpilih pada saat itu adalah Baharai.M.Zein dengan perodesasi dari tahun 2011 s/d 2017. Sebelumnya masih hutan belantara yang digarap oleh masyarakat

tempatan sebagai ladang dengan pola ladang berpindah sebagai adat masyarakat pada waktu itu, dari tahun ketahun seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman kepenghuluan semakin hari semakin bertambah penduduknya dengan adanya para pendatang dari luar daerah termasuk dari daerah pulau Jawa dan juga Sumatra.

Sekarang ini kepenghuluan siarang-arang merupakan salah satu kepenghuluan dari 16 kepenghuluan yang ada di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan sensus/pendataan tahun 2019 sebanyak 783 KK atau 3.139 jiwa.

1. Demografi

Kepenghuluan siarang-arang merupakan salah satu kepenghuluan dari 16 kepenghuluan yang ada dikecamatan Pujud dengan jumlah penduduk sebanyak 3.139 jiwa 783 KK. Iklim kepenghuluan siarang-arang, sebagaimana desa-desa di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis, musim kemarau atau musim hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam masyarakat maupun kesuburan tanah. Kepenghuluan siarang-arang terletak di dataran tinggi yang berjarak \pm 12 KM ke arah Timur dari kota kecamatan dan mempunyai luas wilayah 13.774 Ha. Sedangkan batas sebelah utara Perkebunan Siarang-arang, sebelah selatan Jurong, sebelah barat Suka Jadi dan Babussalam Rokan, sebelah timur Siarang-arang Rokan.

2. Keadaan Sosial

a. Jumlah penduduk Siarang-arang

Tabel IV.I: Jumlah Penduduk

NO	DUSUN	KK	JIWA
1	DUSUN 1	232	951
2	DUSUN 2	193	752
3	DUSUN 3	107	440
4	DUSUN 4	116	431
5	DUSUN 5	135	565
	JUMLAH	783	3.139

Sumber: kantor desa 2021

Tabel diatas menjelaskan, berdasarkan sensus penduduk tahun 2019 kepenghuluan siarang-arang mempunyai jumlah penduduk 3.139 jiwa, jumlah penduduk yang tersebar di dusun 1, dikarenakan banyaknya penduduk asli di dusun 1.

b. Jumlah masyarakat berdasarkan agama

Tabel IV.2: Jumlah Masyarakat Berdasarkan Agama

NO	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	1.555	1.528	3.083
2	Kristen	27	29	56
3	Ktholik	-	-	-
4	Hindu	-	-	-
5	Budha	-	-	-
	Jumlah	1.582	1.557	3.139

Sumber: kantor desa siarang-arang 2021

Tabel diatas menjelaskan bahwa masyarakat banyak menganut agama islam di siarang-arang, ini dikarenakan banyaknya masyarakat suku

melayu pesisir dibanding dari pada suku-suku lain yang menganut agama lain.

c. Tingkat pendidikan masyarakat

Tabel IV.3: Tingkat pendidikan

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tamat SD	182	189	371
Tamat SMP	223	258	481
Tamat SMA	387	210	597
Tamat D2	17	5	22
Tamat D3	5	3	8
Tamat S1	25	25	48
Tamat S2	3	-	3
Jumlah	842	690	1.530

Sumber: kantor Desa Siarang-arang 2021

Tabel diatas menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang terbesar yaitu tamatan SMA, hal ini dikarenakan ketidak mampuan masyarakat untuk melanjut ke jenjang yang lebih tinggi di sebabkan mata pencaharian masyarakat nelayan dan petani.

d. Mata pencairan masyarakat

Tabel IV.4: Mata Pencarian Pokok

NO	Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	599	181	780
2	Buruh Tani	289	57	346
3	PNS	28	20	48
4	Pengrajin Industri RT	1	1	2
5	Pedagang	105	83	188
6	Peternak	8	-	8
7	Nelayan	308	54	369
8	Tenaga Honorer	43	57	100
9	TNI	1	-	1

10	POLRI	-	-	-
	Jumlah	1.382	453	1.835

Sumber: Kantor Desa Siarang-Arang 2021

Tabel diatas menjelaskan bahwa petani, buruh tani dan nelayan mata pencarian masyarakat yang besar, karena masih banyaknya masyarakat yang bermayoritas petani, buruh tani, dan nelayan menunjukkan masyarakat masih banyak dalam kondisi sulit.

Mata pencarian masyarakat Desa Siarang-arang yang terbesar yaitu nelayan sebanyak 369. Pencarian ikan dengan cara menjala, menjaring, mincing, dan lain-lain tidak menjamin untuk memenuhi kehidupan sehari-hari para nelayan, mencari ikan pergi pagi pulang sore itu tidak mendapat hasil yang banyak, semua itu tergantung surut naiknya air di sungai, tergantung peralatan para nelayan, tidak semua nelayan mampu membeli peralatan untuk menangkap ikan, seperti sampan, pompong, jala, jaring dan lain-lain, jika ada pihak lain yang meracun sungai itu juga menjadi kendala nelayan yang lain.

Pendapatan para nelayan juga sangat berpengaruh kepada para pedagang, jika penghasilan nelayan sedikit maka dari itu berkurangnya para pengesumsi pangan, papan, sandang.

e. Masyarakat miskin

Tabel IV.5. Jumlah Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang

No	Dusun	Miskin Per/KK
1	Dusun 1	31 KK
2	Dusun 2	25 KK
3	Dusun 3	15 KK
4	Dusun 4	10 KK
5	Dusun 5	20 KK
	Jumlah	101 KK

Sumber: Kantor Desa Siarang-Arang 2020.

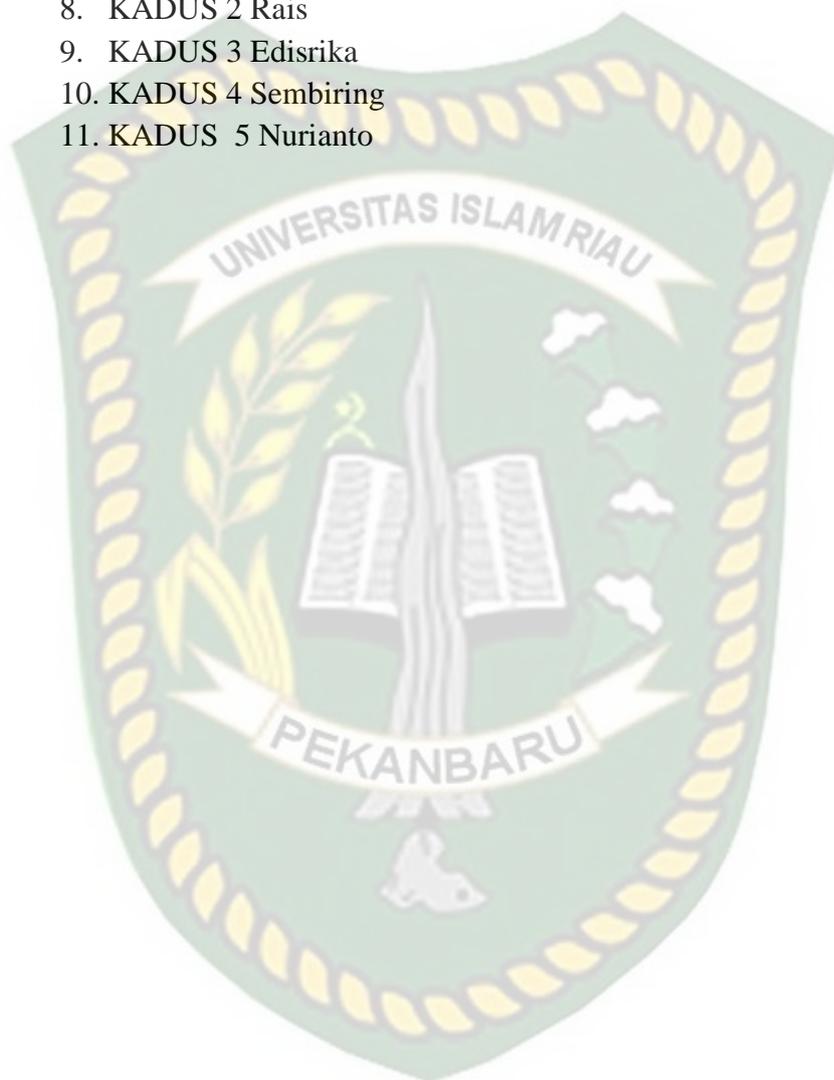
Tabel diatas dapat dilihat jumlah KK miskin yang paling tinggi yaitu Dusun 1 dengan jumlah 31 KK, dan yang paling rendah Dusun 4 dengan jumlah 10 KK, dari tabel diatas dapat dijelaskan masih banyaknya masyarakat miskin di Desa Siarang-arang yang memerlukan bantuan rumah layak huni, sehingga bantuan rumah layak huni sangat di harapkan, di perlukan, di tunggu oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin desa Siarang-arang.

Dari jumlah 101 KK miskin di Desa Siarang-Arang yang menerima bantuan rumah layak huni dari tahun 2010-2020 hanya 15 KK, karena terbatasnya kuota bantuan rumah layak huni, sehingga 86 KK yang belum dapat menerima bantuan.

3. Struktur Organisasi Kepenghuluan Siarang-Arang 2018

- a. KADES Darmalis, SE
- b. SEKDES Bagus Candra Julianto, S. IP
 1. KAUR UMUM Julida Wati
 2. KAUR KEUANGAN Abdul Razak
 3. KAUR PERENCANAAN Siti Rahmah

4. KASI PEM Citra Irawan
5. KASI KESEJAHTERAAN Puja Sardayanti
6. KASI PELAYANAN Syahrizal
7. KADUS 1 Herman
8. KADUS 2 Rais
9. KADUS 3 Edisrika
10. KADUS 4 Sembiring
11. KADUS 5 Nurianto



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Didalam melaksanakan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin didesa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, pada bab ini penulis melakukan wawancara dan kuisisioner dengan tujuan agar mendapatkan informasi secara langsung dengan sampel. Didalam penyebaran kuisioner, wawancara dan kuisisioner yang telah disajikan kepada responden, maka dari itu langkah awal yang harus dilakukan yaitu identitas responden yang dijadikan responden pada penelitian memiliki tingkat pendidikan yang berbeda.

Berkaitan dengan penelitian Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir diperlukan data identitas responden agar penulis bisa membagikan perkelompok. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang terdiri umur, jenis kelamin dan pendidikan, yang dianggap perlu untuk dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Umur

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Untuk penggolongan responden penelitian berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1. Klarifikasi Responden Sebagai Penerima Bantuan Berdasarkan Umur.

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	30-40	5	16%
2	41-50	2	6,5%
3	51-60	11	35,5%
4	61-70	6	19,5%
5	71-80	6	19,5%
6	81-90	1	3%
	Jumlah	31	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat antara usia responden umur 30-40 sebanyak 5 orang atau sekitar 16%, kemudian usia responden 41-50 sebanyak 2 orang atau sekitar 6,5%, kemudian usia responden 51-60 sebanyak 11 orang atau sekitar 35,5%, kemudian usia responden umur 61-70 sebanyak 6 orang atau sekitar 19,5%, kemudian usia responden umur 71-80 sebanyak 6 orang atau sekitar 19,5%, dan usia responden umur 81-90 sebanyak 1 orang atau sekitar 3%. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan jenis kelamin yang merupakan faktor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

2. Jenis kelamin

Jenis kelamin responden juga dipertimbangkan sebagai identitas responden, jenis kelamin dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang dalam menghadapi suatu pekerjaan, laki-laki biasanya akan lebih cepat dari pada perempuan, tetapi perempuan bekerja lebih rapi dalam hasil pekerjaannya. Masing-masing memilih kelebihan dan kekurangan, oleh

karena itu diharapkan keduanya mampu bekerjasama dengan baik. Jenis kelamin juga mempengaruhi tingkat emosional, dimana laki-laki akan lebih cepat terpancing dari pada emosi perempuan dan ini akan mempengaruhi pada hasil pekerjaan. Oleh karena itu untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.2. Klarifikasi Responden Sebagai Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis kelamin	Jumlah responden	Persentase
1	Laki-laki	15	48,4%
2	Perempuan	16	51,6%
	Jumlah	31	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa seluruh jumlah responden sebagai penerima bantuan rumah layak huni sebanyak 31 orang, berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang atau sekitar 48,4%, dan perempuan 16 orang atau sekitar 51,6%.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang didunia ini. Seseorang yang berpendidikan akan berfikir lebih luas dan rasional, dapat membedakan mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak. Orang yang berpendidikan juga bisa lebih mencerna perkataan yang subyektif dan formal, berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan mereka terlihat sulit untuk mengerti setiap bahasa-bahasa yang kita berikan karena

terbiasa menggunakan bahasa daerah. Untuk menentukan pendidikan dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.3. Klarifikasi Responden Sebagai Penerima Bantuan Berdasarkan Pendidikan.

No	Tingkat pendidikan	Jumlah responden	Persentase
1	SD	11	50%
2	SMP	8	36,4%
3	SMA	3	13,6%
	Jumlah	22	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah SD sebanyak 11 orang atau sekitar 50%. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan SMP yang mana berjumlah 8 orang atau sekitar 36,4% dan selanjutnya responden SMA sebanyak 3 orang atau sekitar 13,6%.

B. Gambaran Pelaksanaan Pogram Bantuan Rumah Layak Huni

1. Pelaksanaan Tingkat Pusat

Untuk tingkat Pusat dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan Deputi dibantu oleh pokja, TPM, UPK/BKM, dan KSM, yang menyiapkan bahan perumusan pedoman pelaksanaan kegiatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan perumahan dengan lembaga terkait di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Kepala Bidang menyosialisasikan program kegiatan bantuan perumahan ditingkat Provinsi

dan Kabupaten, setelah melakukan sosialisasi maka dilakukan rekapitulasi dan memverifikasi administrasi permohonan kegiatan bantuan perumahan dari tiap-tiap perwakilan dari provinsi dan Kabupaten, tahapan selanjutnya menyiapkan rumusan penetapan kabupaten penerima bantuan dan rencana sasaran bantuan perumahan, menyampaikan hasil verifikasi administrasi calon penerima bantuan kepada pokja provinsi untuk dilakukan verifikasi lapangan, merumuskan penetapan MBR penerima bantuan untuk ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja, melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan bantuan perumahan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan perumahan kepada deputi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UPK/BKM.

2. Pelaksanaan Tingkat Provinsi

Untuk tingkat provinsi dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Dan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang melaksanakan program RTLH di tingkat Provinsi. Di tingkat provinsi kriteria calon penerima bantuan rumah yaitu rumah tangga miskin dengan kondisi rumah dalam keadaan yang tidak layak untuk di huni, rumah tangga miskin yang berdomisili tetap, memiliki tanah yang siap bangun, kepala keluarga tidak memiliki mata pencarian tidak tetap atau gaji dibah upah minimum dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, tanah yang diusulkan tidak dalam keadaan sengketa, dan belum pernah mendapatkan bantuan rumah. Adapun mekanisme pelaksanaan

bantuan yaitu kepala desa atau sebutan lainnya melakukan musyawarah untuk membentuk pengurusan Pokmas sebagai pelaksanaan program, pengurus Pokmas yang terlibat yaitu ketua, bendahara, tim persiapan, pelaksanaan, pengawasan.

Adapun anggaran bantuan pembangunan bersumber dari APBD, pencairan dilakukan setelah Pokmas menandatangani kontrak dan telah melengkapi semua persyaratan, pencairan dana melalui mekanisme transfer bank dilakukan secara 3 tahap, yang pertama 40% apabila Pokmas telah menyiapkan administrasi teknis berupa perencanaan dan rencana penggunaan. Tahap yang kedua, 30% apabila telah tercapai pekerjaan 30%. Tahap ke 3, 30% apabila pekerjaan telah mencapai 60%.

Monitoring pelaksanaan bantuan pembangunan RTLH menjadi RLH dilakukan oleh Dinas yang menangani program, monitoring dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pembangunan dan RTLH menjadi RLH dengan petunjuk teknis standar operasional prosedur pelaksanaan serta hambatan dan perkembangan. Evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan pembangunan dan RTLH menjadi RLH.

3. Pelaksanaan Tingkat Kabupaten

Untuk tingkat Dinas, terkaitnya covid 19 hari ini, maka untuk mewawancarai orang-orang yang berkaitan di Dinas tidak bisa diwawancarai secara langsung karena kondisi covid 19 ini. Karena kesulitan dalam masa pandemi dan karena kesibukan mereka saya hanya bisa mewawancarai Kepala Bidang Pemukiman dan untuk struktur lainnya di tingkat Dinas tidak bisa

ditemui, pada saat penelitian mereka sedang sibuk dan melalui telpon mereka tidak bisa mengangkat.

Dari sampel yang bisa saya wawancarai faktanya hanya bisa Kepala Bidang Pemukiman maka wawancara terpaksa melalui telepon, berdasarkan wawancara melalui telpon dengan kepala bidang pemukiman yaitu:

Setelah penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Dinas memulai merencanakan sesuai dengan usulan-usulan yang masuk dari masing-masing Kecamatan untuk mendistribusikan rumah layak huni kepada masing-masing Kecamatan. Sehingga di tentukan bagian jatah masing-masing kecamatan. Adapun proses pelaksanaan di tingkat Kabupaten yaitu: menentukan anggaran APBD dari pihak pusat, setelah ditentukan anggaran dari pihak pusat maka pihak dinas melakukan rencana pelaksanaan pada masing-masing kecamatan. Setelah itu dinas melakukan musyawarah untuk menetapkan pengelola program ini yaitu Kepala Bidang Pemukiman dan di bantu oleh Kepala Sub Bidang untuk melakukan pengelolaan, pemantauan, penanggungjawab dan penilaian pelaksanaan program ini dan juga dikendali oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dari kecamatan.

Setelah di tentukan pengelola pelaksanaan bantuan ini dinas menentukan proses penyelenggaraannya yaitu:

- a. Menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan rumah layak huni dan yang memenuhi persyaratan. Yang berhak menerima bantuan rumah layak huni yaitu masyarakat yang berkriteria calon Penerima Program bantuan Rumah Sederhana Layak Huni dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir

Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa Kabupaten Rokan Hilir Riau yaitu: tidak memiliki rumah atau memiliki rumah tidak layak huni, memiliki tanah sendiri atau tanah hibah (di buktikan dengan surat kepemilikan), tanah siap bangun, diutamakan berusia lanjut, status perkawinan (janda, duda, dan utuh) tidak memiliki penghasilan tetap (masyarakat berpenghasilan rendah), berdomisili minimal 5 tahun di desa setempat. Dan yang memenuhi persyaratan yaitu KTP, KK, surat tanah, berusia lanjut, berpenghasilan rendah, masyarakat setempat.

- b. Menentukan lokasi dan anggaran, untuk wilayah tanah perairan dan dataran tinggi maka anggaran di bedakan. Untuk tanah perairan lebih besar jumlah anggaran dari pada dataran tinggi, untuk pencairan dana dilakukan dengan tiga tahap, untuk tahap pertama yaitu 40%, untuk pencairan kedua 30% dan untuk pencairan ketiga 30%.
- c. Menentukan pedoman pelaksanaan bantuan rumah layak huni agar lebih jelas pelaksanaan program ini dari program sebelumnya. Adapun tahap persiapan dalam pembangunan rumah sederhana layak huni dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa Kabupaten Rokan Hilir Riau yaitu: penetapan lokasi dan anggaran, penyusunan pedoman, musyawarah Kepenghuluan/Kelurahan untuk prose penentuan penerima bantuan RSLH (Rencana Anggaran Biaya), penyusunan RAB,

pengesahan/validasi RAB, pembukuan Rekening oleh POKMAS dan penyiapan kontrak, penandatanganan kontrak.

- d. Menentukan pendamping dilapangan. Untuk pendamping dilapangan yaitu pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk tingkat kecamatan dan untuk tingkat desa ada kelompok masyarakat (POKMAS) dan KONSULTAN. Adapun tugas PPTK berdasarkan Perbub Rokan Hilir nomor 19 tahun 2014 yaitu membantu pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun administrasi keuangan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan melakukan evaluasi/ pengecekan gambar rencana, rencana anggaran biaya, laporan penggunaan dana dan laporan mingguan/ perbulan kemajuan fisik kegiatan dari POKMAS. Sedangkan tugas POKMAS berdasarkan Perbub Rokan Hilir nomor 19 tahun 2014 yaitu mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di Kepenghuluan /kelurahan, mengidentifikasi /memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di Kepenghuluan /Kelurahan secara komprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif, menandatangani kontrak kerja dengan pengguna anggaran, menyusun rencana kegiatan yang ada difasilitasi oleh konsultan, mengajukan permohonan pencairan dana dengan di lengkapi data-data pendukung yang di persyaratkan oleh pengguna anggaran, munyusun rencana anggaran biaya

(RAB) pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh konsultan dan dijadikan acuan untuk penentuan biaya kegiatan serta tidak melampaui pagu anggaran untuk setiap unit kegiatan, mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan dalam melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penggunaan dana (LPD) yang di lengkapi dengan bukti berupa kwitansi dan faktur pembelian bahan material dan upah, bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan, pokmas tidak dibenarkan menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga (merupakan sub pelaksanaan kegiatan), pokmas harus mengerjakan sendiri dengan melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja. Dan untuk tugas KONSULTAN sebagai penasihat didalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni.

- e. Melakukan musyawarah dengan tiap-tiap kepenghuluan yang melakukan usulan-usulan yang difasilitasi oleh pihak kecamatan. Adapun tujuan dari musyawarah ini menentukan pelaksanaan kerja dilapangan, yaitu memahami kriteria, persyaratan, penerima bantuan, menentukan anggaran, pencairan dana, pengawasan, penilaian dan cara kerja dilapangan berdasarkan peraturan. Mengusulkan calon penerima bantuan yang telah terdaftar.

4. Pelaksanaan Tingkat Kecamatan

Berdasarkan regulasi Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman Dan Prasarana Desa Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir pelaksana pembangunan rumah layak huni

terdapat pada gambar Struktur Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman Dan Prasarana Desa Dengan Pola Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) yaitu:

- a. Unit/Lembaga Terkait Tingkat Kabupaten (Bappeda, Bapemas)
- b. Kabupaten
 - a) PENGGUNA ANGGARAN
 - b) KEPALA BIDANG PEMUKIMAN
 - c) KASUBID PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU DAN KASUBID TATA PEMUKIMAN SUMBER DAYA DESA/LINGKUNGAN
- c. Kecamatan
 - a) PPTK
- d. Desa
 - a) POKMAS
 - b) KONSULTAN

Secara regulasi camat berperan dalam pelaksanaan program rumah layak huni, tetapi dalam faktanya ternyata desa sudah langsung berhubungan dengan pihak kabupaten. Ternyata ada beberapa peran yang secara regulasi yang ditunjukkan kepada camat yang terdapat dilapangan tidak dilaksanakan.

5. Pelaksanaan Tingkat Desa

Untuk pelaksanaan tingkat desa yang di Kelola oleh POKMAS desa siarang-arang, yang langsung berhubungan ke tingkat kabupaten. Disini POKMAS melakukan tugasnya sebagai pendamping dilapangan. Tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan bantuan rumah layak huni yaitu tahapan pengerjaan program, untuk pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di desa Siarang-arang POKMAS melakukan musyawarah antar RT/RW dan Dusun untuk

perencanaan program, yang dilaksanakan POKMAS, RT/RW dan Dusun yaitu pertama menentukan persyaratan penerima, adapun persyaratannya yaitu KTP, KK, surat tanah, tidak memiliki penghasilan tetap, lanjut usia, memiliki tanggung jawab yang banyak. Kedua menentukan masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan, masyarakat yang berhak menerima bantuan yaitu masyarakat yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Ketiga pelaksanaan program yang dimaksud adalah POKMAS melakukan musyawarah antar RT/ RW dan Dusun mengenai pelaksanaan pengerjaan, setelah melakukan musyawarah RT/RW melakukan pengumpulan data masyarakat miskin yang mendaftar untuk bantuan ini, lalu setelah pengumpulan data, data-data ini di saring dan di usulkan ke kabupaten, setelah di usul ke kabupaten, pihak kabupaten menyeleksi siapa yang berhak menerima, karna tidak bisa semua yang terdata menerima bantuan disebabkan terbatasnya kuota.

Setelah ditentukan penerima dari pihak kabupaten, POKMAS menandatangani kontrak serta menentukan rencana anggaran belanja dan POKMAS membuka rekening di bank riau. Adapun proses rencana anggaran belanjanya yaitu pertama menentukan gambaran pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan misalkan persiapan tukang bangunan, menyediakan bahan-bahan bangunan, membuat pondasi, pemasangan dinding, pemasangan atap, pengecatan dan lain-lain. Kedua membuat daftar harga bahan-bahan yang diperlukan misalnya harga tukang bangunan, harga pasir, harga batu, harga atap, harga keramik, harga cet, dan lain-lain. dan ketiga penjabaran harga tiap-tiap barang dan upah tukang bangunan. Setelah ditentukan rencana anggaran belanja

maka di tentukan tahapan pencairan dana dari APBD kabupaten Rokan Hilir, untuk tahap pertama pencairan sebanyak 40%, yang kedua 30% dan yang ketiga 30%. Setelah pencairan uang maka pelaksanaan fisik kerja bisa dilaksanakan, pertama menentukan lokasi masyarakat yang menerima, mempersiapkan barang-barang bangunan rumah, ketiga melaksanakan fisik yaitu pengerjaan pondasi, pengerjaan dinding, pengerjaan atap, pengerjaan lantai, pengerjaan pelafon, pemasangan pintu dan jendela, dan pengecatan rumah.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dilapangan bahwa keterlibatan RT/RW sangat minimalis, mereka hanya bertugas mengumpulkan data untuk masyarakat yang akan menerima bantuan rumah layak huni, diwilayah mereka masing-masing. Setelah mereka melakukan pengumpulan data, dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan bantuan yang sudah ada ditetapkan, kemudian data-data diserahkan kepada POKMAS, dan untuk data tersebut adalah keputusan POKMAS. Jadi keterlibatan RT/RW disini sangat minimalis.

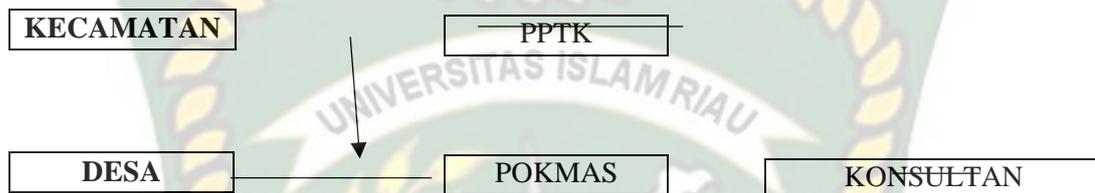
Didalam pembangunan program bantuan rumah layak huni ini banyak masyarakat lain yang merasakan keuntungan, masyarakat yang tidak bekerja bisa mendapatkan pekerjaan yang di ajak oleh tukang bangunan untuk mengerjakan program bantuan rumah layak huni ini, walau pun tidak semua masyarakat yang di desa itu bisa ikut mendirikan bangunan rumah layak huni, karena rumah yang akan dibangun hanya 1 unit atau 2 unit saja. Tidak hanya masyarakat yang bekerja saja yang merasa beruntung dengan adanya bantuan rumah layak huni ini akan tetapi masyarakat yang memiliki usaha toko bangunan bangunan rumah dan lainnya, mereka sebagai pengusaha toko bangunan ini

sangat beruntung jika ada bangunan rumah rumah layak huni karena pihak desa membeli perlengkapan dan peralatan lainnya untuk bangunan rumah layak huni kepada mereka yang punya toko bangunan. Akan tetapi tidak bisa semua di beli di toko bangunan di desa itu, karena ada beberapa ketidak lengkapan isi toko dan juga harga yang miring. Walaupun hanya beberapa ini sangat menguntungkan oleh pihak yang punya kedai bangunan. Oleh karena itu dengan adanya program bantuan rumah layak huni ini sangat-sangat menguntungkan bagi masyarakat, baik itu masyarakat yang menerima bantuan rumah layak huni, masyarakat lainnya yang bekerja sebagai tukang maupun helper bangunan maupun masyarakat di desa itu yang memiliki usaha toko bangunan.

C. Struktur Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni Dari Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kevamatan, dan Desa.



DAYA
DESA/LINGKUNGAN



Sumber: Modifikasi Penelitian 2021.

D. Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Pemerintah kabupaten Rokan Hilir membuat program bantuan rumah layak huni untuk mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasarnya berupa rumah yang layak huni. Pemerintah Rokan Hilir Mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir No. 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Dikatakan pasal 2 poin 1 bahwa dinas perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman merupakan unsur yang melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari enam indikator yang meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecendrungan (dispostion) para pelaksana, komunikasi antar organisasi

dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik, yang bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan adalah kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realisasi dengan sosiokultur yang mengada ditingkat pelaksanaan kebijakan atau disebut juga tepatnya pelaksanaan pengukuran waktu pembangunan rumah dan tercapainya tujuan yang layak untuk masyarakat. Dengan adanya pengertian ukuran dan tujuan kebijakan maka dalam Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Di desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu:

- a. Terwujudnya RLH bagi masyarakat
- b. Menyediakan akses ekonomi
- c. Kesejahteraan masyarakat

Selanjutnya untuk lebih jelas mengetahui tanggapan atau jawaban responden dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.4. Jawaban Responden Mengenai Indikator Tujuan Kebijakan Dalam Bantuan Rumah Layak Huni Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	Terwujudnya RLH bagi masyarakat	19 (61,3%)	12 (38,7%)	0 (0%)	31
2	Menyediakan akses ekonomi	14 (45,2%)	17 (54,8%)	0 (0%)	31

3	Kesejahteraan masyarakat	22 (71%)	9 (29%)	0 (0%)	31
Jumlah		55	38	0	93
Rata-rata		18,3	12,7	0	31
Persentase		59%	41%	0%	100%

Sumber: olahan data penelitian 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil penilaian pada indikator tujuan kebijakan dari 31 responden masyarakat siarang-arang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir, yang pertama item penilaian terwujudnya RLH bagi masyarakat jawaban responden berjumlah 19 orang atau 61,3% efektif karena dengan adanya bantuan rumah layak huni dapat terwujudnya rumah yang layak, yang fasilitasnya lengkap, yang nyaman ditempati, beratapkan seng, lantai dari keramik, dinding dari batu. sedangkan berada pada kategori cukup efektif berjumlah 12 orang atau 38,7% karena dengan terwujudnya rumah layak huni tidak semua masyarakat bisa menerima ini semua, disebabkan rumah yang sekarang ditempati terlalu sempit untuk anggota keluarga yang lebih banyak, dan yang berada pada kategori kurang efektif tidak ada atau 0%.

Sedangkan item penilaian yang kedua menyediakan akses ekonomi untuk kategori efektif 14 orang responden atau 45,2% karena tidak semua masyarakat bisa ikut bekerja dalam pembangunan rumah layak huni disebabkan ada mata pencarian yang lain, yang berada pada kategori cukup efektif 17 orang atau 54,8% karena dengan adanya bantuan rumah layak huni dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang ada disiarang-arang. dan yang kurang efektif tidak ada atau 0%.

Kemudian untuk item penilaian yang ketiga kesejahteraan masyarakat untuk kategori efektif yaitu 22 orang atau 71% karena dengan adanya bantuan rumah layak huni dapat mewujudkan hak dasar hidup yaitu berupa rumah yang layak untuk di huni, untuk kategori cukup efektif 9 orang atau 29% karena ada masyarakat masih belum sejahtera disebabkan kondisi ekonomi yang sulit untuk anggota keluarganya yang banyak, dan untuk kategori kurang efektif tidak ada orang atau 0%.

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 3 item penilaian indikator tujuan kebijakan yaitu Efektif atau 59%. Karena dapat kita lihat dari tabel dengan adanya bantuan rumah layak huni dapat mensejahterakan masyarakat dan juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan tidak hanya itu dengan adanya bantuan rumah layak huni juga dapat mewujudkan rumah yang layak untuk di tempati masyarakat. Selain dari hasil jawaban responden pada pengisian kuisisioner, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan POKMAS desa siarang-arang mengenai indikator tujuan kebijakan, beliau menyatakan:

“untuk indikator tujuan kebijakan ini untuk masyarakat penerima bantuan rumah layak huni. Dengan adanya bantuan rumah layak huni, dapat terwujudnya sebuah hak dasar berupa rumah yang layak untuk di tempatkan atau di huni oleh masyarakat yang tidak mampu. Terwujudnya hak dasar berupa rumah sangat membantu kekurangan masyarakat dalam kelangsungan hidup, dengan adanya bantuan ini dapat mensejahterakan masyarakat. Dan terwujudnya masyarakat yang sejahtera maka tercapailah tujuan dari program yang kami lakukan ini” (wawancara 23 maret 2021).

Dari observasi yang peneliti lakukan, dapat diketahui Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin di Desa Siarang-Arang

Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir di ketahui bahwa dengan adanya bantuan ini dapat mensejahterakan masyarakat dengan mendapatkan rumah yang layak di huni dan mendapatkan fasilitas yang baik, dan juga mendapatkan pekerjaan untuk masyarakat lain yang ada di desa siarang-arang, untuk membantu mendirikan rumah layak huni bersamaan dengan tukang bangunan rumah layak huni. peneliti mengetahui ini dari hasil tanggapan responden yang menanyakan kesejahteraan masyarakat dan menyediakan akses ekonomi sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir di kategorikan efektif.

Berdasarkan hasil kuisioner, wawancara dan observasi bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir efektif, dimana diketahui tujuan kebijakan yang tersusun melalui terwujudnya RLH bagi masyarakat, menyediakan akses ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat membantu masyarakat yang ada di desa siarang-arang dengan adanya bantuan rumah layak huni dapat mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah orang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni. Tetapi tidak hanya sumber daya manusia saja ada juga sumber daya lain yaitu sumber daya anggaran, material, teknologi dan sumber daya waktu. Dengan adanya sumber daya maka dalam Pelaksanaan Program Bantuan

Rumah Layak Huni Didesa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan

Hilir penulis menetapkan 5 item penilaian yaitu:

- a. Manusia
- b. Anggaran
- c. Material
- d. Teknologi
- e. Waktu

Selanjutnya untuk lebih jelas mengetahui tanggapan responden atau jawaban dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.5. Jawaban Responden Mengenai Indikator Sumber Daya Dalam Bantuan Rumah Layak Huni Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	Manusia	13 (41,9%)	18 (58%)	0 (0%)	31
2	Anggaran	9 (29%)	22 (71%)	0 (0%)	31
3	Material	13 (42%)	18 (58%)	0 (0%)	31
4	Teknologi	13 (42%)	16 (51,6%)	2 (6,5%)	31
5	Waktu	6 (14,4%)	23 (74,2%)	2 (6,5%)	31
Jumlah		54	97	4	155
Rata-rata		10,8	19,4	0,8	31
Persentase		34,8%	62,6%	2,6%	100%

Sumber: olahan data peneliti 2021

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat hasil penilaian responden sumber daya dari 31 responden, yang pertama item penilaian sumber daya manusia untuk kategori efektif 13 orang atau 41,9% karena untuk pemilihan penerima bantuan rumah layak huni masih adanya belum termasuk kategori penerima bantuan, sedangkan kategori cukup efektif 18 orang atau 58% karena pada pemilihan penerima desa sudah memilih yang memenuhi persyaratan yang tergolong miskin, dan kategori kurang efektif tidak ada atau 0%.

Sedangkan untuk penilaian item yang kedua sumber daya anggaran untuk kategori efektif 9 orang atau 29% karena anggaran yang dinyatakan sesuai dengan fisik rumah, sedangkan kategori cukup efektif 22 orang atau 71% karena tidak semua masyarakat penerima mengetahui anggaran per unit rumah, dan kategori kurang efektif tidak ada atau 0%. Dalam pengerjaan bangunan rumah layak huni anggaran yang diperlukan satu unit rumah 85 juta, tahapan yang pertama dilakukan yaitu pengerjaan pondasi, dalam pengerjaan pondasi yang digunakan batu, pasir, besi, semen, dan tanah untuk penimbunan pondasi, anggaran yang di gunakan 14 juta. Tahap yang kedua yaitu pemasangan dinding, dalam pemasangan dinding yang digunakan semen, batu, besi, dan pasir, anggaran yang digunakan 12 juta. Tahapa yang ketiga yaitu pemasangan atap, alat yang di gunakan yaitu paku, broti, papan, seng, anggaran yang digunakan 14 juta. Tahapan yang keempat pemasangan lantai, alat yang digunakan pasir, semen, keramik, anggaran yang digunakan 10 juta. Tahapan yang kelima yaitu pemasangan pelapon, alat yang digunakan paku dan triplek, anggaran yang digunakan 3 juta. Tahapan yang keenam yaitu pemasangan jendela dan pintu, alat

yang digunakan bahan jendela, bahan pintu, baut, engsel, dan alat-alat lain, anggaran yang digunakan 6 juta. Tahapan yang ketujuh yaitu pengecatan dinding, anggaran yang digunakan 2 juta. Anggaran 85 juta ini juga digunakan untuk upah tukang bangunan dan masyarakat yang terlibat yaitu sebanyak 20 juta, dan untuk alat transportasi dan untuk membeli kran, alat-alat lampu, upah pemasangan listrik sebanyak 4 juta.

Sedangkan untuk item penilaian yang ketiga sumber daya material untuk kategori efektif 13 orang atau 42% karena material yang digunakan sesuai dengan kebutuhan bangunan, kategori cukup efektif 18 orang atau 58% karena tidak semua penerima mengetahui jumlah material yang dibeli dan jumlah harga material, dan untuk kategori kurang efektif tidak ada atau 0%.

Untuk item penilaian yang keempat sumber daya teknologi untuk kategori efektif 13 orang atau 42% karena rumah yang dibangun oleh pemerintah itu sesuai tempat atau sesuai tanah dengan kualitas bangunan, untuk kategori cukup efektif 16 orang atau 51,6% karena tidak semua masyarakat mengetahui teknologi pembangunan, dan untuk kategori kurang efektif 2 orang atau 6,5% karena adanya bangunan rumah tidak sesuai fisik rumah dengan tanah rawa.

Dapat kita ketahui setiap tahun semua masyarakat dapat menerima bantuan rumah layak huni karena terbatasnya kuota, penerima bantuan tidak hanya masyarakat Siarang-Arang atau masyarakat Kecamatan Pujud saja, karena masih adanya desa-desa lain yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi rumah setiap tahunnya pasti terjadi perubahan antara rumah yang sudah lama dapat dengan yang baru menerima bantuan ini. Perbedaannya hanya sebatas cet yang

pudar dan sedikit berlumut. Untuk bangunan tidak ada yang berbeda dari tahun 2010-2020 semua fasilitas yang masyarakat terima sama semua, perbedan hanya terdapat pada harga bahan bangunan, untuk ukuran sama.

Dan untuk item penilaian yang kelima sumber daya waktu kategori efektif 6 orang atau 14,4% karena waktu yang dijanjikan 2 bulan tepat target, kategori cukup efektif 23 orang atau 74,2% karena waktu yang dijanjikan tidak tepat target disebabkan kendala pencairan dana yang harus ditunggu dan untuk kategori kurang efektif 2 orang 6,5% karena tidak tepat target pembangunan yang dijanjikan menyebabkan masyarakat harus lama untuk mengungsi di tempat orang atau saudara.

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 5 item penilaian indikator sumber daya yaitu cukup efektif atau 62,6%. Karena sumber daya belum tepat sasaran disebabkan pendataan belum sesuai persyaratan atau kriteria kemiskinan, masih kurangnya informasi mengenai anggaran rumah, material yang digunakan, teknologi pembangunan berdasarkan tempat atau tanah dan belum tepat waktu pembangunan. Selain dari hasil jawaban responden pada pengisian kuisioner, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan POKMAS desa siarang-arang mengenai indikator sumber daya, beliau menyatakan:

“Untuk sumber daya manusia dikarenakan kuota penerima terbatas, setiap tahun belum tentu di desa siarang-arang mendapatkan bantuan rumah layak huni, terkadang paling banyak hanya 5 orang yang mendapatkan dalam 2 tahun sekali, jadi tidak bisa ditetapkan, untuk menentukan sumber daya penerima bantuan RT/RW mendata masyarakat yang tergolong miskin dan data-data tersebut kami serahkan ke Dinas. Untuk sumber daya anggaran itu untuk pencairan dananya 3 tahap, untuk tahap pertama 40%, untuk tahap kedua 30%, dan untuk tahap ketiga 30%

dan untuk anggaran per unit 85 juta. Sedangkan sumber daya material untuk bangunan rumah setiap pencairan dana kami membeli alat-alat seperlunya terlebih dahulu, dan untuk sumberdaya waktu itu 2 bulan untuk mendirikan rumah bantuan ini. Sumber daya teknologi kami hanya menyesuaikan fisik rumah dengan tanah yang akan dibangun, setiap tanah itu berbeda-beda volumenya ada yang tanah keras dan ada yang rawa. Dan untuk sumber daya waktu untuk 1 rumah yaitu 2 bulan, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan pencairan dana” (wawancara 23 maret 2021).

Dari observasi yang peneliti lakukan, dapat diketahui Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir di ketahui bahwa sumber daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman belum tepat sasaran, dimana peneliti melihat pendataan penerima bantuan rumah layak huni hanya melalui pendataan penerima dari laporan RT dan RW. Seharusnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman melakukan pendataan ulang agar data-data masyarakat yang menerima bantuan rumah layak huni lebih jelas. Sehingga yang menerima bantuan rumah layak huni tidak seluruhnya dalam kriteria kemiskinan melainkan ada kepentingan khusus. Peneliti mengetahui ini dari hasil tanggapan responden yang menyatakan pencapaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam menentukan sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya material dan sumber daya waktu.

Berdasarkan hasil kuisisioner, wawancara dan observasi bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir cukup efektif, dimana di ketahui sumber daya yang tersusun melalui sumber daya manusia, anggaran, material, teknologi dan waktu belum didata secara langsung oleh Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman melainkan hanya sebatas laporan RT dan RW.

3. Sikap atau Kecendrungan (Disposisi) Para Pelaksana

Sikap atau kecendrungan (disposisi) para pelaksana adalah sikap yang dimiliki oleh implementator kebijakan seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas terhadap program. Dengan adanya sikap atau kecendrungan maka dalam Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Didesa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu:

- a. Keberpihakan pengambilan keputusan
- b. Pengawasan pelaksanaan bantuan

Selanjutnya agar lebih jelas mengetahui tanggapan dan jawaban responden dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator Disposisi Dalam Bantuan Rumah Layak Huni Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup efektif	Kurang efektif	
1	Keberpihakan pengambilan keputusan	8 (25,8%)	23 (74,2%)	0 (0%)	31
2	Pengawasan pelaksanaan bantuan	21 (67,7%)	10 (32,3%)	0 (%)	31
Jumlah		29	33	0	62
Rata-rata		14,5	16,5	0	31
Persentase		46,8%	53,2%	0%	100%

Sumber: olahan data peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil penilaian responden sikap atau kecendrungan dari 31 responden, yang pertama item penilaian keberpihakan pengambilan keputusan kategori efektif 8 orang atau 25,8% karena pengambilan keputusan penerimaan bantuan berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai kriteria kemiskinan dan persyaratan penerima, sedangkan kategori cukup efektif 23 orang atau 74,2% karena masih banyaknya masyarakat yang belum menerima menimbulkan rasa iri, hal ini disebabkan untuk memprioritaskan masyarakat miskin janda dan lanjut usia. dan untuk kategori kurang efektif tidak ada atau 0%. Sedangkan yang kedua item penilaian pengawasan pelaksanaan bantuan untuk kategori efektif 21 orang atau 67,7% karena pengawasan bantuan rumah layak huni sampai ke tengah masyarakat, sedangkan cukup efektif 10 orang atau 32,3% karena pengawasan penerimaan bantuan rumah layak huni di desa siarang-arang sudah dilakukan oleh pihak Desa siarang-arang, sehingga Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman tidak perlu kelapangan, dan untuk kategori kurang efektif tidak ada atau 0 %.

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 2 item penilaian indikator sikap atau kecendrungan yaitu cukup efektif atau 53,2% karena pengambilan keputusan penerimaan bantuan yang dilakukan oleh Dinas dan Desa belum tepat sasaran dan pengawasan pelaksanaan masih sebatas laporan Desa kepada pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Selain dari hasil jawaban responden pada pengisian kuisisioner, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan ketua POKMAS desa siarang-arang, beliau menyatakan:

“untuk disposisi kami sebagai aparat desa atau pelaksana program rumah layak huni untuk masyarakat siarang-arang, sangat merespon baik dan berusaha menjalankan kerja ini sebaik-baiknya. Karena terbatasnya kuota dari kabupaten masih banyaknya masyarakat miskin yang belum menerima bantuan ini. Mendengar keluhan masyarakat miskin yang telah terdata yang belum menerima kami selaku pelaksana juga perihatin, dan kami juga berharap agar bisa bersama-sama melaksanakan program ini dengan baik dan mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera” (wawancara 23 maret 2021).

Dari observasi yang peneliti lakukan, dapat diketahui Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir di ketahui bahwa sikap atau kecendrungan (disposisi) para pelaksana bahwa pengambilan keputusan oleh pihak Desa belum tepat sasaran, karena masyarakat yang menerima bantuan belum dapat dikatakan dalam kriteria miskin, hal ini dikarenakan belum dilakukan pengawasan dengan baik oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, sehingga masih banyaknya masyarakat yang tergolong miskin belum mendapat bantuan rumah layak huni. Peneliti mengetahui ini dari hasil tanggapan responden yang menyatakan keberpihakan pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan bantuan dapat dikatakan dalam kategori cukup efektif.

Berdasarkan hasil kuisisioner, wawancara, dan observasi bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir cukup efektif, dimana keberpihakan pengambilan keputusan dan pengawasan yang dilakukan pihak desa belum tepat sasaran, hal ini dikarenakan penerima bantuan tidak

terkait kriteria kemiskinan dan masih ada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan.

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksanaan

Komunikasi adalah mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan sebagai proses penyampaian berita, informasi yang mengandung arti dari satu pihak (seseorang atau tempat) lain, dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Dengan adanya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan maka dalam Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Didesa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu?

- a. Sosialisasi peraturan
- b. Koordinasi
- c. SOP

Selanjutnya untuk lebih jelas mengetahui tanggapan atau jawaban responden dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.7. Jawaban Responden Mengenai Indikator Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksanaan Dalam Bantuan Rumah Layak Huni Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup efektif	Kurang efektif	
1	Sosialisasi peraturan	9 (29%)	21 (67,7%)	1 (3,2%)	31
2	Koordinasi	9 (29%)	20 (64,5%)	2 (6,5%)	31
3	SOP	8 (25,8%)	22 (71%)	1 (3,2%)	31

Jumlah	26	63	4	93
Rata-rata	8,7	21	1,3	31
Persentase	28.1%	67,7%	4,2%	100%

Sumber: olahan data peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil penilaian responden komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan dari 31 responden, yang pertama item penilaian sosialisasi peraturan untuk kategori efektif 9 orang atau 29% karena sosialisasi peraturan disampaikan oleh RT dan RW , sedangkan kategori cukup efektif 21 orang atau 67,7% karena sosialisasi peraturan hanya dimusyawarah antar pokmas, RT, RW dan dusun, masyarakat hanya mendapat informasi dari RT dan RW, dan kategori kurang efektif 1 orang atau 3,2% karena tidak semua masyarakat mengetahui adanya bantuan rumah layak huni ini disebabkan karna belum secara menyeluruh diberitahukan kepada masyarakat.

Sedangkan item penilaian yang kedua koordinasi untuk kategori efektif 9 orang atau 29% karena koordinasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan pihak Desa Siarang-arang dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di desa Siarang-Arang sudah terlaksana, sedangkan kategori cukup efektif 20 orang atau 64,5% karena kerja sama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dengan Desa Siarang-arang hanya sebatas himbauan tidak mendata secara langsung, sehingga masih banyaknya masyarakat miskin belum menerima bantuan karena hanya sebatas laporan RT, dan RW, dan kategori kurang efektif 2 orang atau 6,5% karena kerjasama antar Dinas, Desa dan masyarakat belum benar, disebabkan pendataan penerimaan bantuan rumah layak huni belum sampai ketengah masyarakat.

Sedangkan untuk item penilaian SOP untuk kategori efektif 8 orang atau 25,8% karena standar operasional prosedur pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Desa Siarang-arang sudah terlaksanakan, untuk kategori cukup efektif 22 orang 71% karena standar operasional prosedur belum akurat disebabkan pelaksanaan musyawarah peraturan dan persyaratan hanya sebatas pihak Desa saja tidak secara langsung musyawarah dengan masyarakat miskin, dan untuk kategori kurang efektif 1 orang 3,2 % karena masyarakat tidak mengikuti musyawarah peraturan dan persyaratan mengenai pelaksanaan program bantuan rumah layak huni.

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 3 item penilaian indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan yaitu cukup efektif atau 67,7% karena kurangnya kerja sama antar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan pihak Desa siarang-arang dan masyarakat miskin. Selain dari hasil jawaban responden dari pengisian kuisioner, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada ketua POKMAS desa sirang-arang, beliau menyatakan:

“untuk komunikasi kami melakukan musyawarah dengan kepala dusun, RW, RT untuk mensosialisasikan bantuan rumah layak huni ini baik itu sosialisasi persyaratan, pelaksanaan, pengawasan, sumberdaya dan lainnya. Maka dari itu yang terjun kelapangan untuk melihat masyarakat yang tidak mampu dan untuk pengumpulan persyaratan saya serahkan kepada RT/RW” (wawancara 23 maret 2021).

Dari observasi peneliti lakukan, dapat diketahui Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir di ketahui bahwa untuk sosialisasi peraturan, koordinasi dan SOP oleh pihak Desa belum dilakukan secara baik,

karena belum ada musyawarah langsung antar pihak Dinas, desa dan masyarakat, melainkan hanya sebatas informasi dari RT dan RW, sehingga masyarakat siarang-arang tidak tahu dengan adanya program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin didesa siarang-arang. Peneliti mengetahui ini dari hasil tanggapan responden yang menyatakan sosialisasi peraturan dan koordinasi SOP dikatakan cukup efektif.

Berdasarkan hasil kuisisioner, wawancara, dan observasi bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir cukup efektif, dimana diketahui komunikasi yang disusun melalui sosialisasi peraturan, koordinasi dan SOP yang diketahui masyarakat hanya sebatas informasi dari RT dan RW, yang seharusnya di sampaikan dalam musyawarah antar pihak Desa dan masyarakat.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik adalah menunjukkan bahwa kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam rana pelaksanaan yang dapat mempengaruhi kesuksesan program dalam pelaksanaan. Dengan adanya lingkungan ekonomi, sosial dan politik maka dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni didesa siarang-arang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu:

- a. Ekonomi
- b. Sosial
- c. Politik

Selanjutnya untuk lebih jelas mengetahui tanggapan atau jawaban responden dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.8. Jawaban Responden Mengenai Indikator Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik Dalam Bantuan Rumah Layak Huni Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup efektif	Kurang efektif	
1	Ekonomi	17 (54,8%)	9 (29%)	5 (16,1%)	31
2	Sosial	11 (35,5%)	17 (54,8%)	3 (9,7%)	31
3	Politik	17 (54,8%)	14 (45,2%)	0 (0%)	31
Jumlah		45	40	8	93
Rata-rata		15	13,3	2,7	31
Persentase		48,3%	43%	8,7%	100%

Sumber: olahan data peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil penilaian responden lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari 31 responden, yang pertama item penilaian ekonomi untuk kategori efektif 17 orang atau 54,8% karena dengan adanya bantuan rumah layak huni sangat membantu untuk memberdayakan masyarakat, menanggulangi kemiskinan masyarakat yang menerima bantuan, sedangkan kategori cukup efektif 9 orang atau 29% karena dengan adanya bantuan rumah layak huni dapat membantu kondisi ekonomi masyarakat, dan kategori kurang efektif 5 orang atau 16,1% dengan adanya bantuan rumah layak huni ini tidak semua masyarakat merasa ternanggulangi kemiskinan sebab melihat kondisi zaman semakin modern semakin banyak kebutuhan.

Sedangkan untuk item penilaian yang kedua sosial untuk kategori efektif 11 orang atau 35,5% dengan adanya bantuan rumah layak huni kondisi sosial masyarakat lebih berkembang dengan lingkungan yang baru, sedangkan kategori cukup efektif 17 orang atau 54,8% karena adanya bantuan rumah layak huni kondisi sosial masyarakat cukup mendorong masyarakat lebih cerdas, jujur, dan bertanggung jawab, dan kategori kurang efektif 3 orang atau 9,7% karena dengan adanya bantuan rumah layak huni tidak semua masyarakat bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar sebab masih adanya masyarakat miskin yang belum menerima bantuan.

Sedangkan untuk item penilaian politik untuk kategori efektif 17 orang atau 54,8% karena didalam program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin tidak ada unsur politik, kategori cukup efektif 14 orang atau 45,2% karena masih adanya salah paham antar masyarakat dan pihak desa mengenai penerimaan bantuan rumah layak huni ini, sebab masih adanya masyarakat miskin yang belum menerima, dan untuk kategori kurang efektif tidak ada atau 0%.

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 3 item penilaian indikator lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yaitu efektif 48,3 karena dengan adanya bantuan rumah layak huni dapat mensejahterakan masyarakat, menanggulangi kemiskinan, mendorong masyarakat cerdas, bertanggung jawab dan jujur. Selain dari hasil jawaban responden pada pengisian kuisisioner, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dengan kepala POKMAS desa siarang-arang, beliau menyatakan:

“untuk lingkungan sosial, ekonomi, politik tentunya bantuan rumah layak huni ini sangat membantu sekali untuk ekonomi masyarakat miskin, bantuan rumah layak huni ini sangat membantu kekurangan mereka dalam kelangsungan hidup, apalagi untuk mereka yang tidak berpenghasilan tetap. Dan untuk sosial dan politik kami melihat, merasakan dengan adanya bantuan rumah layak huni ini dapat meningkatkan kesejahteraan disetiap daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan untuk desa siarang-arang ini” (wawancara 23 maret 2021).

Dari observasi yang peneliti lakukan, dapat diketahui Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Didesa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir diketahui bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik dapat dikategorikan efektif, dimana peneliti melihat dengan adanya bantuan rumah layak huni dapat meningkatkan kondisi ekonomi, mensejahterakan masyarakat, dan terwujudnya masyarakat cerdas dan lebih bertanggung jawab. Peneliti mengetahui ini dari tanggapan responden yang menyatakan dengan adanya bantuan ini dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil kuisisioner, wawancara dan observasi bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir efektif, dimana diketahui lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tersusun melalui ekonomi, sosial dan politik dapat mensejahterakan masyarakat.

E. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun hambatan yang dapat penulis rangkumkan perindikator mengenai pelaksanaan program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin di desa siarang-arang, yaitu:

1. Tujuan Kebijakan

Hambatan untuk indikator tujuan kebijakan adalah lemahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan program bantuan rumah layak huni, masih banyak masyarakat menganggap bantuan rumah layak huni akan mendapat rumah dan fasilitas yang bagus dan sesuai dengan ekspektasi mereka, tetapi rumah yang didapat hanya sebuah rumah yang berdesain tipe 36 yang berfasilitas kamar yang berukuran kecil 2, kamar mandi, dan teras. Hal ini sangat mengecewakan masyarakat yang berkeluarga atau anaknya banyak.

Tujuan dari program ini juga untuk memberi peluang kerja kepada masyarakat desa setempat dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi, ini juga menjadi hambatan dalam program ini karena masyarakat pengangguran berlomba-lomba ingin mengikuti tahapan pembangunan rumah layak huni, akan tetapi rumah yang dibangun dengan masyarakat yang ingin ikut serta dalam program ini hanya satu atau dua rumah dalam setahun. Maka tidak semua masyarakat pengangguran dapat bekerja dalam pembangunan rumah layak huni ini. Hal ini meresahkan pihak desa sebagai pelaksanaan program bantuan rumah layak huni.

2. Sumber Daya

Hambatan untuk indikator sumber daya adalah masih kurangnya kuota bantuan rumah layak huni di Desa Siarang-arang sehingga masih banyak masyarakat belum menerima bantuan rumah layak huni dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai anggaran, material pembangunan, teknologi bangunan dan waktu.

Dengan kurangnya kuota bantuan rumah layak huni menjadi hambatan dalam tujuan program bantuan rumah layak huni, karena masih banyaknya masyarakat miskin di desa siarang-arang yang membutuhkan bantuan rumah layak huni, tetapi pihak pelaksanaan desa siarang-arang tidak diam begitu saja, pihak desa mencari informasi untuk kendala ini dan ternyata tidak hanya masyarakat desa siarang-arang saja yang sangat membutuhkan ini, akan tetapi desa-desa lain yang berada di kabupaten rokan hilir ini masih banyak tergolong miskin dan sangat membutuhkan bantuan rumah layak huni ini. Maka dari itu pihak pemerintahan kabupaten membagikan kuota tiap-tiap desa dengan mengutamakan yang lebih membutuhkan.

3. Sikap atau Kecendrungan (Disposisi) Para Pelaksana

Hambatan untuk indikator sikap atau kecendrungan (disposisi) para pelaksana adalah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman belum memberikan pencapaian program rumah layak huni. Hal ini dikarenakan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman hanya menerima laporan dari Desa Saiarang-arang akan penetapan masyarakat miskin.

Masih adanya masyarakat yang memenuhi persyaratan yang belum mendapatkan bantuan rumah layak huni karena pihak desa mengutamakan

yang lebih membutuhkan seperti janda dan lanjut usia, maka dari ini dapat menimbulkan komentar masyarakat, hal ini karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman hanya menerima laporan dari pihak Desa dan tidak mengulang pendataan.

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksanaan

Hambatan untuk indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses pembangunan rumah layak huni ini, karena belum dilakukannya sosialisasi oleh kepala desa secara langsung kepada masyarakat akan adanya program bantuan rumah layak huni hanya kepada POKMAS, DUSUN, RW dan RT semata, sehingga masyarakat secara umum tidak mengetahui program ini.

Hambatan ini terjadi karena waktu musyawarah yang tidak tepat, di peraturan daerah pelaksanaan program ini di musyawarahkan dengan masyarakat dan prangkat desa lainnya, akan tetapi tidak semua masyarakat bisa menghadiri musyawarah pelaksanaan program ini karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka dari itu pengetahuan masyarakat menjadi kurang terhadap bantuan ini melainkan hanya sekedar informasi dari RT/RW saja yang bisa diterima oleh masyarakat.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hambatan untuk indikator lingkungan ekonomi, sosial, dan politik adalah masih adanya masyarakat menganggap bahwa ekonomi belum

meningkat dengan adanya bantuan rumah layak huni dan mereka belum bisa sepenuhnya simpatik kepada lingkungan sekitar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Untuk indikator tujuan kebijakan yang memiliki item penilaian terwujudkan RLH bagi masyarakat, menyediakan akses ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berada pada kategori efektif. Hal ini dikarenakan bantuan rumah layak huni sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat memenuhi hak dasar yaitu berupa rumah yang layak untuk di tempati dan dapat memberi pekerjaan untuk masyarakat setempat. Hal ini lah yang membuat pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Desa Siarang-arang efektif.
2. Untuk indikator sumber daya yang memiliki item penilaian sumber daya manusia, anggaran, material, teknologi dan waktu berada pada kategori cukup efektif. Hal ini dikarenakan bantuan rumah layak huni kuotanya terbatas sehingga masih banyak masyarakat belum menerima bantuan rumah layak huni.
3. Untuk indikator sikap dan kecendrungan (disposisi) para pelaksanaan yang memiliki item penilaian keberpihakan pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan bantuan berada pada kategori cukup efektif.

dimana keberpihakan pengambilan keputusan dan pengawasan yang dilakukan pihak desa belum tepat sasaran, hal ini dikarenakan penerima bantuan tidak terkait kriteria kemiskinan dan masih ada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan.

4. Untuk indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan memiliki item penilaian sosialisasi peraturan, koordinasi dan SOP pada kategori cukup efektif. Hal ini terjadi karena tidak adanya sosialisasi langsung dengan masyarakat, sosialisasi ini hanya dilakukan dengan POKAS, DUSUN, RW dan RT.
5. Untuk indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik memiliki item penilaian ekonomi dan sosial dan politik berada pada kategori efektif. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi hak dasarnya yaitu rumah dan membantu mengurangi kemiskinan daerah Kabupaten Rokan Hilir khususnya Desa Siarang-arang.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penelitian sajikan dari keseluruhan hasil yang telah didapatkan yaitu:

1. Demi terlaksananya program bantuan rumah layak huni dengan efektif, peneliti mengharapkan kepada para pelaksana program ini yang ditanggung jawabkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman agar lebih teliti dan lebih tegas dalam pendataan yang benar-benar berhak untuk menerima.

2. Kepada setiap pendamping dari kabupaten agar melakukan pengawasan disetiap kecamatan melainkan tidak hanya menerima laporan dari pihak desa saja.
3. Hendaknya pemerintah Rokan Hilir menambah kuota bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin, khususnya masyarakat yang telah terdata yang belum menerima.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Faried. 2011. *Teori dan konsep administrasi*. Jakarta: PT Raja Grafinda Parsada.
- Ali, zaini & raden hafiz .2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh Publishing.
- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks Yang Berubah*. Pekanbaru Alaf: Riau
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hamim, Sofian. 2005. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru: Uir Press.
- Hany, Hikmat. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk. 2015. *Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Maksudi, Beddy Irawan. 2017. *Dasar-dasar Administrasi Publik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.

- Nugroho, Heru. 2021. *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siswanto. 2013. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangunkan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Rafika Aditama
- Suyanto, Bangong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Prenadamedia Group.
- Syafril, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Thohir, Mudjahirin. 2008. *Perseptif Kemiskinan*: UNDIP.
- Vionasari, Delvin. 2019. *Analisis Faktor Kegagalan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dikelurahan Dompok Program Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang
- Wahab, Sholichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wedayanti, Made Devi. 2018. *Menajemen Corporate Social Responsibility*. Pekanbaru-Riau: Marpoyan Tujuh Publishing.

Widjaja, Haw. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: Rajawali Press.

Winardi. 2010. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Gramedia.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Persindo

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasidan Manajemen*. Pekanbaru: UIRPress.

Zulkifli & Yogya, Moris A. 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru-Riau. Marpoyan Tujuh Publishing.

Dokumen:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.
2. Undang-undang Republik indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Kawasan Pemukiman.
4. Peraturan Pemerintah Pasal 1 Ayat (7). No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan.
5. PERBUP Kab. Rokan Hilir No.57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hilir.

6. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Bidang Pemukiman Dan Prasarana Desa.

Web:

https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_rokan_hilir

<https://anyssar-lombokutara.desa.id>

<https://kotakpintar.com>

yunitaardha.blogspot.com

<https://monitorriau.com/news/detail/14525/tahun-2020dinas-perkim-rohil-bangun-103-rlh-skala-prioritas>

